Skripsi Andreas

by Andreas Putra

Submission date: 14-Jun-2026 02:17PM (UTC+0700)
Submission ID: 2982646600
File name: cek_turnitin_andreas.docx (1.74M)
Word count: 21446
Character count: 143951

STUDI EVALUASI DAMPAK PP No. 108 TAHUN 2015 TERHADAP KESEJAHTERAN SUKU KOMODO DI PULAU KOMODO

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akademik dan Memenuhi
Syarat Pencapaian Gelar Sarjana Strata-1 Program Studi
Administrasi Negara

Oleh :

ANDREAS PUTRA JOMI
1112200033

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sejak tahun 2015, Joko Widodo selaku Presiden Indonesia, telah menetapkan sektor pariwisata sebagai sektor utama. Dalam hal ini, pengembangan aktivitas ekonomi masyarakat di sektor pariwisata diberikan prioritas dan memerlukan dukungan dari aktivitas ekonomi di sektor-sektor lainnya. Pariwisata itu sendiri diartikan sebagai suatu fenomena sosial, ekonomi, dan budaya yang terjadi di suatu daerah, yang kemudian mendorong orang-orang dari berbagai latar belakang untuk mengunjungi daerah itu. Pergerakan atau perjalanan yang berlangsung dalam konteks pariwisata ini bisa dipicu oleh motivasi pribadi maupun profesional atau untuk kepentingan bisnis. (Yakup, 2019)

Dalam beberapa tahun terakhir, kemajuan dalam bidang pariwisata terlihat dari meningkatnya kontribusinya terhadap ekonomi, baik secara internasional maupun domestik. Di seluruh dunia, industri pariwisata dan perjalanan memberikan kontribusi langsung sebesar US$7,7 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di tahun 2022 (STATISTA, 2024). Amerika Serikat dan Cina adalah dua negara dengan kontribusi tertinggi dari sektor perjalanan dan pariwisata terhadap PDB. Negara-negara Eropa dan Asia lainnya seperti Jerman, Inggris, dan Jepang juga menunjukkan sumbangan signifikan dari pariwisata terhadap perekonomian mereka. Gambaran kontribusi pariwisata di tingkat global menunjukkan bahwa perhatian dalam mengembangkan ekonomi mulai beralih ke sektor pariwisata dan perjalanan. Negara-negara yang sebelumnya dikenal karena industrinya seperti Jepang, Cina, Jerman, dan Amerika Serikat juga kini tengah mengembangkan sektor pariwisata mereka, yang terlihat dari sumbangan ekonomi yang cukup substansial yang dihasilkan oleh sektor ini.

Di Indonesia, kontribusi sektor pariwisata juga menunjukkan tren peningkatan setidaknya sebelum pandemi COVID-19 melanda. Ekonomi yang dihasilkan dari sektor ini tercatat sebesar Rp765,3 triliun pada tahun 2019, yang menyumbang sekitar 4,97 persen terhadap PDB nasional (Katadata, 2024). Capaian ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan 2016, ketika sektor pariwisata hanya menghasilkan Rp576,7 triliun dengan kontribusi sebesar 4,65 persen terhadap ekonomi nasional.Namun, pandemi COVID-19 yang membatasi mobilitas menjadi penyebab penurunan kontribusi sektor pariwisata, di mana hanya menciptakan Rp346 triliun atau setara dengan 2,24 persen dari perekonomian nasional. Meskipun mengalami penurunan akibat pandemi, dengan banyaknya potensi daya tarik wisata yang dimiliki Indonesia, diharapkan kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi nasional bisa terus mengalami perkembangan di masa depan. Selain potensi peningkatan nilai ekonomi, pengembangan sektor pariwisata juga diharapkan dapat

memberikan manfaat positif lainnya, seperti perkembangan industri kreatif yang selaras dengan sektor pariwisata, peningkatan kualitas hidup sosial, pelestarian budaya, dan perbaikan lingkungan. Kontribusi sektor pariwisata akan dijelaskan lebih lanjut di bagian berikutnya.(Utami & Kafabih, 2021)

Perkembangan sektor pariwisata dapat berdampak pada penciptaan peluang kerja di berbagai aktivitas ekonomi dalam sektor ini. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melaporkan bahwa ada 21,26 juta orang yang bekerja di sektor pariwisata pada tahun 2021. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2018, di mana pada tahun itu ada 19,46 juta tenaga kerja di sektor pariwisata. Secara khusus, tenaga kerja tersebut berasal dari tiga aktivitas ekonomi, yaitu penjualan produk pariwisata, penyediaan makanan dan minuman, serta layanan transportasi darat.

Penciptaan pekerjaan di sektor pariwisata tentu berdampak pada pendapatan pekerja dalam sektor ini. Dengan pertumbuhan sektor pariwisata yang mampu menarik minat wisatawan asing, hal ini berpotensi meningkatkan pengeluaran untuk kegiatan wisata, yang pada gilirannya akan meningkatkan spillover atau dampak positif pada pendapatan tenaga kerja. Secara keseluruhan, ini akan membawa kontribusi yang berarti terhadap ekonomi nasional dalam jangka panjang.Aktivitas ekonomi di sektor pariwisata dapat memberikan kontribusi langsung kepada perekonomian masyarakat di suatu daerah atau negara. Pariwisata cenderung lebih inklusif dengan melibatkan banyak pelaku ekonomi untuk berkontribusi dalam sektor ini. Berbeda dengan sektor industri yang seringkali memerlukan investasi besar untuk pengembangannya, kegiatan ekonomi di bidang pariwisata tidak selalu memerlukan modal tinggi, sehingga masyarakat pada umumnya dapat berpartisipasi langsung dalam kegiatan ekonomi ini.

Dalam konteks Indonesia, sektor pariwisata memiliki potensi yang besar berkat kondisi geografis yang khas. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia terdiri dari lebih dari 17. 000 pulau, yang terletak dari Sabang hingga Merauke. Keindahan alam, kekayaan budaya, dan keanekaragaman hayati menjadikan Indonesia sebagai tujuan wisata yang sangat menarik. Data dari Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa provinsi dengan jumlah pulau terbanyak adalah Kepulauan Riau, diikuti oleh Papua Barat dan Maluku Utara. Sementara itu, provinsi seperti Yogyakarta dan Jambi memiliki jumlah pulau paling sedikit.Dengan luas area hampir 2 juta kilometer persegi dan populasi sekitar 265 juta orang, Indonesia memiliki potensi wisata yang luar biasa, baik untuk wisatawan lokal maupun internasional. Keragaman budaya, tradisi, adat istiadat, serta bahasa daerah menjadi keunggulan kompetitif dalam mengembangkan pariwisata berkelanjutan..(Wibowo et al., 2017)

Dikenal sebagai Zamrud Khatulistiwa, Indonesia bukan hanya kaya akan keanekaragaman geografis dan hayati, tetapi juga memiliki warisan budaya yang kuat dan menarik. Oleh sebab itu, sektor pariwisata dianggap sebagai lebih dari sekadar industri hiburan; ia berfungsi sebagai cara untuk mempromosikan Indonesia

kepada dunia, memperkuat perekonomian nasional, serta menjaga dan melestarikan lingkungan serta warisan budaya. Saat ini, pariwisata menjadi salah satu fondasi perekonomian bangsa. Kekayaan alam dan budaya yang tersebar di seluruh penjuru negeri membuka peluang baru dalam ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mendorong perkembangan sektor-sektor seperti transportasi, perhotelan, kuliner, dan industri kreatif.

Setiap daerah di Indonesia memiliki daya tarik dan ciri khasnya masing-masing. Di Sumatera, Danau Toba dan Bukit Lawang adalah contoh tempat yang menyuguhkan keindahan alam sekaligus pelestarian fauna. Pulau Jawa menyajikan kombinasi keindahan alam dan warisan budaya, seperti pemandangan menakjubkan Gunung Bromo serta Candi Borobudur dan Prambanan yang diakui sebagai warisan budaya dunia. Bali, yang menjadi simbol pariwisata global, tetap menjadi destinasi favorit berkat pantai-pantai yang menawan serta kekayaan budaya dan spiritual yang mendalam. Di bagian timur Indonesia, Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi tempat yang populer, dengan Labuan Bajo sebagai akses utama menuju ekowisata kelas dunia..(Bahri & Abdilah, 2022)

Sebagai jawaban terhadap meningkatnya ketertarikan pengunjung, pemerintah meluncurkan program “10 Bali Baru” serta menerapkan prinsip “pariwisata berkelanjutan,” yang menyoroti keseimbangan antara perkembangan ekonomi, pelestarian alam, dan penguatan masyarakat lokal. Dalam konteks ini, partisipasi pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting. Berdasarkan UU RI No. 9 Tahun 1990 mengenai Kepariwisataan, pariwisata mencakup semua aktivitas yang terkait dengan perjalanan dan usaha yang mendukungnya. Indonesia memiliki potensi wisata laut yang sangat besar, terutama dengan adanya terumbu karang yang menarik perhatian pengunjung. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata difokuskan pada prinsip keberlanjutan, dengan penggunaan sumber daya alam dan manusia secara bijak untuk jangka panjang.. (Westoby et al., 2021)

Sebagai sebuah negara yang kaya akan beragam etnis, bahasa, serta budayanya, Indonesia menarik minat negara-negara lain untuk lebih mengenal wisata yang dimiliki. Tempat-tempat seperti Bali, Lombok, Papua, dan Labuan Bajo telah menjadi terkenal di kalangan dunia internasional. Dalam Rakornas Kepariwisataan ke-IV pada tahun 2016, sektor ini dipandang sebagai penggerak utama ekonomi daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hampir semua wilayah di Indonesia kini berusaha untuk meningkatkan kualitas pariwisata di daerah masing-masing, sejalan dengan target nasional yang ambisius, yaitu menarik 20 juta wisatawan asing dan 275 juta wisatawan domestik, serta menciptakan 13 juta lapangan kerja pada tahun 2019. Namun, pengembangan pariwisata juga membawa beberapa tantangan. Dominasi bisnis oleh perusahaan besar dapat merugikan para pelaku lokal. Oleh karena itu, penting bagi sektor swasta untuk berperan aktif dalam mendukung pariwisata yang berkelanjutan, tetapi hal itu juga harus dilengkapi dengan perlindungan terhadap kepentingan komunitas lokal.Untuk meningkatkan kualitas destinasi, semua pihak yang terlibat perlu memahami elemen dasar dalam

pengembangan pariwisata, yaitu 4A: Daya tarik, Aksesibilitas, Fasilitas penunjang, dan Fasilitas tambahan. Jika keempat aspek ini dapat dipenuhi, maka akan meningkatkan kepuasan para wisatawan dan mengangkat reputasi destinasi..((2024), n.d.)

NTT merupakan provinsi kepulauan yang terdiri dari 22 kabupaten/kota, dengan keanekaragaman sumber daya alam yang tersebar luas. Pada 2016, sektor pariwisata di NTT menyumbang pendapatan hingga Rp2 triliun, dengan jumlah kunjungan wisatawan sekitar 90.000–100.000 per tahun. Kabupaten Manggarai Barat, khususnya Labuan Bajo, menjadi destinasi unggulan berkat kehadiran Pulau Komodo. Pantai Nemberala di Rote Ndao dan Nihi Watu di Pulau Sumba bahkan telah mendapatkan pengakuan internasional.(Manthofi & Aisyah, 2024)

Penghargaan Pesona Indonesia 2016 yang diterima oleh NTT sebagai pemenang utama dari sepuluh kategori semakin menguatkan posisinya sebagai tujuan wisata tingkat dunia. Seiring dengan pengembangan konsep Kota Cerdas di daerah ini, diharapkan potensi pariwisata dapat terus berkembang melalui kebijakan lokal yang berbasis pada data dan teknologi. Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan peluang wisata, mulai dari keindahan alam seperti Taman Nasional Komodo, Danau Kelimutu, hingga kekayaan budaya lokal yang unik dan autentik. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor pariwisata semakin didorong untuk menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sejalan dengan peningkatan jumlah pengunjung baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Kabupaten Manggarai Barat merupakan salah satu wilayah administratif di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia, yang secara resmi berdiri pada 25 Februari 2003. Pembentukan kabupaten ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2003, sebagai hasil pemekaran dari wilayah Kabupaten Manggarai yang sebelumnya lebih luas dan mencakup seluruh wilayah barat Pulau Flores. Dengan lahirnya Manggarai Barat, pemerintah daerah baru dapat mengelola wilayah dan potensi lokal secara lebih fokus termasuk segala aspek sosial, budaya, dan ekonomi.

Ibu kota dari Kabupaten Manggarai Barat adalah Labuan Bajo, sebuah kawasan pesisir di ujung barat Pulau Flores yang sejak lama dikenal sebagai pelabuhan alami dan pertemuan masyarakat dari berbagai suku. Labuan Bajo awalnya dikenal sebagai sebuah kelurahan kecil di Kecamatan Komodo, yang secara tradisional menjadi pelabuhan berlabuh suku Bajo sebuah suku maritim yang sejak lama datang dari wilayah Sulu, Filipina Selatan dan beradaptasi dengan kehidupan nelayan di kawasan Flores.

Namun, sejak menjadi ibu kota Kabupaten Manggarai Barat, Labuan Bajo perlahan tumbuh menjadi titik sentral kegiatan pemerintahan, ekonomi dan terutama pariwisata. Lokasinya yang strategis sebagai gerbang menuju Taman Nasional Komodo habitat Komodo dan pulau-pulau eksotis lain seperti Komodo, Rinca,

Padar, serta keindahan lautnya membuat Labuan Bajo menarik kunjungan wisatawan domestik dan internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat dan daerah telah mendorong Labuan Bajo menjadi destinasi pariwisata bertaraf internasional atau kota pariwisata. Di bawah arah pembangunan nasional melalui berbagai rencana strategis, Labuan Bajo dikembangkan sebagai Destinasi Super Prioritas (DSP) dengan peningkatan fasilitas umum, infrastruktur, serta pelayanan di sektor perhotelan, transportasi, pusat kuliner, dan ekonomi kreatif. Langkah ini bertujuan agar Labuan Bajo tidak hanya menjadi tujuan transit wisatawan, tetapi sebagai pusat kunjungan wisata yang lengkap dengan pengalaman budaya, alam, dan petualangan.

Gambar 1. 1 Peta Manggarai Barat



Diambil dari google map

Gambar 1. 2Jumblah Penduduk kabupaten manggari barat Tahun 2024

Kecamatan Subdistrict	Ibukota Kecamatan Capital of Sub District	Luas (km2) Total Area (square.km)	Persentase terhadap Luas Kabupaten Percentage to Subdistrict's Area	Jumlah Pulau Number of Islands	Tinggi Wilayah (mdpl) Altitude (m a.s.l.)	Jarak Ke Ibukota Distance to the capital
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10 Komodo	Labuan Bajo	813,53	25,88	186	44	1,20
11 Boleng	Terang	486,56	15,49	11	21	42,70
20 Sano Nggoang	Wineng	360,19	11,47		347	52,40
21 Mbeliling	Warlower	231,53	7,37		391	28,40
30 Lembor	Wae Nakeng	145,68	4,64		181	61,10
31 Welak	Orong	319,19	10,16		542	69,00
32 Lembor Selatan	Lengkong Ceporang	275,87	8,78	1	123	78,90
40 Kuwus	Golo Welu	54,55	1,74		1161	122,00
41 Ndoso	Ndoso	124,95	3,98		621	137,00
42 Kuwus Barat	Landong	42,66	1,36		861	79,00
50 Macang Pacar	Bari	174,64	5,56	3	61	112,00
51 Pacar	Pacar	112,12	3,57		654	89,20
Manggarai Barat	-	**3 141,47**	**100,00**	**201**	-	-

di ambil dari BPS Manggarai barat

Kabupaten Manggarai Barat adalah salah satu daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berperan penting dalam memajukan sektor wisata. Luas wilayah kabupaten ini mencapai kurang lebih 2. 947,50 km², yang mencakup bagian barat Pulau Flores serta beberapa pulau besar seperti Komodo, Rinca, dan Longos, ditambah dengan sejumlah pulau kecil lain. Selain itu, perairan di sekitar Manggarai Barat memiliki luas sekitar 7. 052,97 km², menjadikannya sebagai daerah dengan garis pantai yang panjang serta potensi kelautan yang sangat tinggi.

Sejak tahun 2014, Kabupaten Manggarai Barat telah melakukan pemekaran administratif, sehingga jumlah kecamatannya meningkat dari tiga menjadi sepuluh. Kecamatan tersebut meliputi Komodo, Boleng, Sano Nggoang, Mbeliling, Lembor, Lembor Selatan, Kuwus, Welak, Ndoso, dan Macang Pacar. Dari total 121 desa atau kelurahan yang ada, terdapat 23 desa yang termasuk dalam kawasan pesisir, sedangkan 98 desa lainnya berada di daerah non-pesisir. Lima kecamatan yang memiliki desa pesisir adalah Komodo, Boleng, Sano Nggoang, Lembor Selatan, dan Macang Pacar. Sebaliknya, lima kecamatan lainnya, yaitu Mbeliling, Lembor, Welak, Kuwus, dan Ndoso, tidak memiliki desa yang masuk dalam kategori pesisir.

Panjang garis pantai dan keragaman jenis wilayah pesisir yang ada di Kabupaten Manggarai Barat menghasilkan karakter pantai yang berbeda-beda di setiap daerah. Setiap pantai menawarkan keunggulan masing-masing, baik dari sudut pandang bentang alam, ekosistem, maupun nilai sejarah dan budaya yang terhubung dengan komunitas sekitar. Namun, tidak semua kawasan yang dekat dengan pantai dapat dengan mudah berkembang menjadi tujuan wisata bahari yang berpotensi. Berbagai faktor memengaruhi suksesnya pengembangan daerah pantai sebagai lokasi wisata, antara lain kebutuhan masyarakat setempat, pola kehidupan, kesadaran terhadap potensi wisata, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung sektor pariwisata.

Labuan Bajo, yang merupakan ibu kota Kabupaten Manggarai Barat, telah mengalami pertumbuhan pesat dan menjadi salah satu kota wisata utama di Indonesia. Perkembangan ini berkaitan erat dengan peran sektor pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Namun, pertumbuhan dalam sektor pariwisata ini juga berdampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat di sekitarnya. Dari sudut sosial dan budaya, terdapat perubahan nilai-nilai tradisional yang muncul akibat interaksi yang intens antara masyarakat lokal dan turis asing. Pergeseran ini adalah akibat dari interaksi budaya, serta pengaruh kemajuan teknologi dan informasi global yang kian meluas.Di tengah perubahan ini, sektor pariwisata tetap menjadi unggulan bagi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Potensi wisata di daerah ini dinilai lebih besar dibanding daerah lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keunggulan geografi, kekayaan alam, serta beragam budaya menjadi aset utama dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.

Berbagai atraksi wisata di seluruh kabupaten mencakup keindahan alam, keunikan ekosistem laut, hingga warisan budaya yang masih dijaga. Salah satu daya tarik utama yang menjadi simbol Kabupaten Manggarai Barat adalah Taman Nasional Komodo (TNK). TNK terkenal tidak hanya karena adanya spesies langka Komodo (Varanus komodoensis), tetapi juga karena kekayaan alamnya yang terlindungi, termasuk pemandangan savana, ekosistem laut, dan terumbu karang yang menakjubkan.Komodo, yang merupakan reptil purba dan satu-satunya jenis naga yang masih ada di dunia, menjadi lambang kebanggaan nasional serta aset penting dalam menarik wisatawan asing. Sejak dikenal luas, pulau-pulau di sekitar TNK mulai ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai negara, terutama dari Eropa dan Amerika. Kehadiran Komodo menjadi daya tarik utama dalam mempromosikan TNK ke dunia pariwisata internasional. Lebih dari sekadar objek wisata, Komodo melambangkan kekayaan biodiversitas Indonesia yang tidak ada di tempat lain.Manajemen kegiatan wisata di Taman Nasional Komodo saat ini dilaksanakan dengan pendekatan ekowisata, yaitu pariwisata yang berlandaskan pada prinsip pelestarian alam dan pemberdayaan masyarakat lokal. Aktivitas wisata di TNK mencakup berbagai kegiatan yang berfokus pada edukasi lingkungan, pengamatan satwa liar, snorkeling, diving, serta pelayaran antar pulau. Melalui pendekatan ekowisata ini, diharapkan pengembangan pariwisata tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, melainkan juga menjaga kelestarian ekosistem serta meningkatkan kesadaran tentang konservasi di kalangan wisatawan dan masyarakat setempat..(Prasetya, n.d.)

Dalam konteks pengelolaan kawasan konservasi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Peraturan ini menjadi landasan hukum penting dalam pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia, termasuk kawasan taman nasional yang memiliki fungsi perlindungan keanekaragaman hayati sekaligus pemanfaatan secara terbatas untuk kepentingan pendidikan, penelitian, wisata alam, dan pemberdayaan masyarakat.

Secara substansial, PP Nomor 108 Tahun 2015 menegaskan bahwa pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) harus dilaksanakan melalui kegiatan perencanaan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian secara sistematis. Dalam regulasi ini ditegaskan bahwa taman nasional dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian, pendidikan, wisata alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, serta pemanfaatan energi terbarukan, dengan tetap menjaga prinsip kelestarian lingkungan. Artinya, pemanfaatan kawasan konservasi tidak semata-mata berorientasi pada perlindungan, tetapi juga membuka ruang bagi kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain itu, peraturan ini juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat yang berada di sekitar kawasan konservasi. Pemerintah diwajibkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan desa konservasi, pemberian akses pemanfaatan tradisional, kemitraan dengan pemegang izin, serta pemberian izin pengusahaan jasa wisata alam. Ketentuan ini menunjukkan bahwa aspek kesejahteraan masyarakat menjadi bagian integral dalam pengelolaan kawasan konservasi.

Dalam konteks pengelolaan kawasan seperti Taman Nasional Komodo, regulasi ini memiliki implikasi langsung terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat lokal, terutama nelayan dan pelaku usaha pariwisata. Kebijakan zonasi, pembatasan pemanfaatan sumber daya, serta pengembangan wisata alam yang diatur dalam kerangka konservasi berpotensi memberikan dampak positif maupun negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan PP Nomor 108 Tahun 2015 menjadi salah satu dasar kebijakan yang relevan untuk dianalisis dalam penelitian ini, khususnya dalam menilai sejauh mana kebijakan pengelolaan kawasan konservasi mampu menyeimbangkan antara tujuan pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

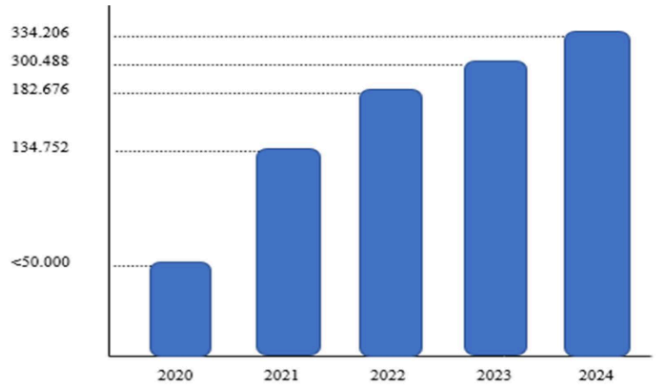
Untuk itu, perencanaan pariwisata ke depan harus mampu menjawab tantangan mendasar yang selama ini dihadapi oleh masyarakat Manggarai Barat, khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pembangunan infrastruktur, promosi destinasi, dan penguatan konektivitas antarwilayah perlu diiringi dengan pendekatan yang sensitif terhadap konteks sosial-budaya setempat. Partisipasi aktif warga, baik dalam penyusunan kebijakan maupun pengelolaan destinasi, menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa pariwisata berkembang secara adil dan merata.Penguatan kelembagaan masyarakat lokal, seperti kelompok sadar wisata (Pokdarwis), koperasi pariwisata, serta usaha mikro dan kecil berbasis komunitas, harus menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah.

Pemberian pelatihan, pendampingan, serta akses terhadap modal dan pasar akan memperkuat posisi masyarakat sebagai aktor utama dalam rantai ekonomi pariwisata. Dengan demikian, manfaat dari sektor ini tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak, melainkan tersebar secara lebih merata ke seluruh lapisan masyarakat. perlindungan terhadap lingkungan hidup harus tetap menjadi fondasi dari setiap langkah pembangunan. Ekosistem laut, hutan, dan kawasan konservasi yang menjadi daya tarik wisata perlu dijaga dari tekanan berlebih akibat aktivitas pariwisata massal. Penetapan batas kunjungan, pengelolaan limbah yang efektif, serta penerapan standar keberlanjutan dalam operasional usaha pariwisata harus diperkuat. Pendekatan ini sejalan dengan semangat ekowisata, yang menempatkan pelestarian sebagai prioritas sejajar dengan pencapaian ekonomi.

pengembangan pariwisata tidak boleh melupakan pentingnya pelestarian budaya lokal. Ritual adat, arsitektur tradisional, bahasa daerah, serta praktik-praktik lokal dalam menjaga alam harus dihormati dan dijadikan bagian dari narasi

kepariwisataan. Kolaborasi antara pelaku budaya, tokoh adat, dan pelaku pariwisata dapat membuka ruang untuk inovasi produk wisata berbasis kearifan lokal yang autentik dan bernilai edukatif.Dengan komitmen bersama dan arah kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan, Kabupaten Manggarai Barat dapat menjadi contoh sukses dari pembangunan pariwisata yang inklusif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Potensi yang dimiliki daerah ini tidak hanya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga memperkuat identitas budaya dan memperluas kontribusi Indonesia dalam menjaga kekayaan alam dunia.(Ismowati et al., 2022)

Gambar 1. 3 Data Pengunjung Pulau Komodo Tahun 2020-2024



sumber:www.komodoislands.com

Pulau Komodo, salah satu tujuan wisata terkemuka di Indonesia yang dikenal dengan keindahan alam dan eksistensi hewan langka komodo, menunjukkan peningkatan jumlah pengunjung yang terus-menerus dari tahun ke tahun. Dari grafik yang ada, terlihat adanya pertumbuhan yang signifikan dalam jumlah wisatawan selama lima tahun terakhir.

Pada tahun 2020, jumlah kunjungan tercatat kurang dari 50. 000, disebabkan oleh pembatasan perjalanan yang diberlakukan akibat pandemi COVID-19. Namun pada tahun 2021, terdapat lonjakan drastis dengan jumlah pengunjung yang meningkat hampir tiga kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Tren positif ini berlanjut hingga tahun 2022, di mana jumlah kunjungan melampaui 180. 000 orang. Tahun 2023 mencatat peningkatan lebih lanjut, mendekati angka 300. 000 pengunjung, mencerminkan pemulihan sektor pariwisata nasional dan naiknya ketertarikan wisatawan terhadap ekowisata.

Puncaknya terjadi pada tahun 2024 dengan total kunjungan mencapai sekitar 334.000 wisatawan. Angka tersebut menunjukkan bahwa Pulau Komodo kembali

menjadi salah satu destinasi wisata unggulan, baik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Peningkatan jumlah wisatawan ini menjadi indikator keberhasilan promosi pariwisata dan pengelolaan kawasan konservasi yang dilakukan pemerintah. Kawasan wisata menjadi semakin dikenal di tingkat internasional, bahkan aktivitas wisata seperti kapal pesiar yang bersandar di dermaga wisata Komodo mulai semakin meningkat dari tahun ke tahun. Namun di balik keberhasilan tersebut, penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan konservasi, pengembangan pariwisata, dan keberlangsungan hidup masyarakat lokal agar masyarakat Suku Komodo tidak hanya menjadi penonton di tanah mereka sendiri.

Dalam upaya menjaga ekosistem laut, Balai Taman Nasional Komodo melakukan berbagai pembatasan terhadap aktivitas masyarakat, khususnya nelayan tradisional. Nelayan dilarang menangkap ikan di sejumlah wilayah perairan yang telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi dan area penyelaman wisata. Tim patroli gabungan yang melibatkan Balai Taman Nasional Komodo, Polair, dan Gakkum Wilayah III bahkan melakukan pengawasan ketat di beberapa titik seperti Selatan Pulau Rinca, Gilimotang, Loh Dasami, Padar Utara dan Selatan, Gililawa, hingga beberapa wilayah perairan Komodo lainnya. Berdasarkan informasi yang dikutip dari CNN Indonesia, masyarakat lokal tidak lagi bebas menangkap ikan di wilayah yang selama ini menjadi sumber mata pencaharian utama mereka.(Eriksson et al., 2019)

Kondisi tersebut menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat lokal. Wisata berbasis konservasi yang seharusnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru dalam praktiknya menimbulkan tekanan ekonomi karena masyarakat dipaksa menyesuaikan diri dengan sistem baru yang belum tentu mampu menjamin kehidupan mereka secara layak. Pembatasan wilayah tangkap membuat banyak nelayan tradisional kehilangan akses terhadap ruang hidup mereka sendiri. Masyarakat yang sejak dahulu hidup bergantung pada laut kini harus pergi lebih jauh ke laut lepas untuk mencari ikan dengan risiko ombak besar, biaya bahan bakar yang tinggi, dan ancaman keselamatan yang lebih besar.

Selain pembatasan wilayah tangkap, masyarakat juga menghadapi keterbatasan ruang hidup akibat sebagian besar wilayah Pulau Komodo berada dalam pengelolaan kawasan konservasi pemerintah pusat. Kondisi tersebut membuat masyarakat tidak lagi bebas membuka lahan baru untuk permukiman, pertanian, maupun peternakan. Akibatnya wilayah permukiman masyarakat menjadi semakin padat sementara jumlah penduduk terus bertambah setiap tahun. Banyak masyarakat mulai khawatir bahwa suatu saat nanti anak cucu mereka tidak lagi memiliki ruang hidup di Pulau Komodo dan terpaksa keluar dari tanah kelahiran mereka sendiri untuk mencari tempat tinggal dan pekerjaan di luar daerah.Situasi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan konservasi belum

sepenuhnya mempertimbangkan realitas sosial masyarakat lokal. Masyarakat tidak hanya kehilangan akses terhadap wilayah tangkap tradisional mereka, tetapi juga kehilangan kesempatan untuk mengembangkan kehidupan ekonomi secara mandiri. Sebelumnya sebagian masyarakat masih dapat bertani dan beternak secara sederhana untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka, namun setelah kawasan konservasi diberlakukan secara ketat, aktivitas tersebut menjadi sangat terbatas. Akibatnya masyarakat hanya bergantung pada sektor nelayan dan pariwisata sebagai sumber penghasilan utama.

Di sisi lain, masyarakat lokal juga mengalami kesulitan untuk berkembang dalam sektor pariwisata karena rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya pelatihan keterampilan yang diberikan kepada masyarakat. Infrastruktur pendidikan di Desa Komodo masih sangat terbatas karena hanya tersedia fasilitas pendidikan sampai tingkat SD dan SMP. Untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, masyarakat harus keluar dari Pulau Komodo dengan biaya yang cukup besar. Kondisi ekonomi keluarga yang terbatas menyebabkan banyak anak muda akhirnya putus sekolah sejak usia dini dan memilih bekerja membantu keluarga.

Kurangnya akses pendidikan dan pelatihan keterampilan menyebabkan masyarakat lokal kalah bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah dalam sektor pariwisata. Industri pariwisata modern membutuhkan kemampuan bahasa asing, pelayanan wisata, pengelolaan usaha, dan keterampilan profesional lainnya yang sebagian besar belum dimiliki masyarakat lokal. Akibatnya posisi-posisi penting dalam sektor pariwisata lebih banyak diisi oleh tenaga kerja dan pengusaha dari luar daerah yang memiliki pendidikan, modal, dan pengalaman yang lebih baik. Sementara masyarakat lokal sebagian besar hanya memperoleh pekerjaan kecil dengan penghasilan yang tidak menentu. masyarakat lokal belum sepenuhnya mampu hidup secara layak di tengah berkembangnya industri pariwisata di daerah mereka sendiri. Keuntungan ekonomi dari pariwisata lebih banyak dinikmati oleh investor dan pengusaha besar, sementara masyarakat lokal masih menghadapi kesulitan ekonomi, keterbatasan ruang hidup, rendahnya pendidikan, dan minimnya akses modal usaha. Situasi ini memperlihatkan adanya ketimpangan antara tujuan pembangunan pariwisata dengan kondisi nyata masyarakat lokal di lapangan.

Untuk memahami fenomena tersebut, penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan publik dari William N. Dunn. Dalam teori Dunn dijelaskan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari tercapainya tujuan formal seperti peningkatan wisata dan perlindungan lingkungan, tetapi juga harus dilihat dari aspek pemerataan, responsivitas, efektivitas, kecukupan, dan ketepatan kebijakan terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam praktiknya, pendekatan

konservasi yang bersifat top-down di Pulau Komodo dinilai belum sepenuhnya memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal.

Larangan menangkap ikan tanpa solusi alternatif yang memadai bagi nelayan menunjukkan bahwa kebijakan belum cukup responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, pembatasan ruang hidup masyarakat dan minimnya akses pendidikan serta pelatihan keterampilan menyebabkan masyarakat lokal sulit berkembang dan tidak mampu bersaing secara layak dalam sektor pariwisata. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan konservasi dan pengembangan pariwisata di Pulau Komodo masih menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi bagi masyarakat lokal. Menurut Dunn, kebijakan dapat dikatakan efektif apabila mampu menyelesaikan persoalan utama masyarakat tanpa menimbulkan masalah baru. Namun dalam konteks Pulau Komodo, kebijakan konservasi justru memunculkan persoalan baru seperti meningkatnya kesulitan ekonomi masyarakat, keterbatasan ruang hidup, ketidakpastian masa depan generasi muda, serta rendahnya kemampuan masyarakat lokal dalam bersaing di sektor pariwisata. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak kepada masyarakat lokal agar konservasi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan secara seimbang.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Melihat latar belakang diatas dapat di buat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak Kebijakan PP No. 108 Tahun 2015 terhadap kesejahteraan masyarakat suku komodo di pulau komodo?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Mendeskripsikan dampak Kebijakan PP No. 108 Tahun 2015 terhadap Kesejahteraan Masyarakat suku komodo di Desa Komodo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan pada Tujuan penelitian diatas, maka adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Praktis :

1) Evaluasi Kebijakan pemerintah Agar lebih baik memperhatikan dan memprioritaskan kepentingan warga lokal Pariwisata.

2) Bagi peneliti lain, diharapkan sebagai bahan rujukan untuk meneliti lebih jauh mengenai permasalahan Kebijakan publik dalam dunia Pariwisata terutama di bagian Indonesia Timur.

1.5.2 Manfaat Teoretis

1) Untuk memperkaya literatur atau kajian teori terkait evaluasi kebijakan publik di dunia pariwisata.

2) Untuk memenuhi persyaratan akademik guna mencapai gelar

sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 HASIL PENELITIAN

4.1.1 DESKRIPSI OBJEK

Penelitian ini dilaksanakan di Pulau Komodo yang secara administratif termasuk dalam wilayah Desa Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pulau Komodo merupakan salah satu kawasan konservasi dan destinasi wisata internasional yang sangat terkenal karena menjadi habitat asli satwa komodo (Varanus komodoensis), yaitu spesies kadal terbesar di dunia yang hanya ditemukan di Indonesia. Selain memiliki nilai ekologis yang tinggi, Pulau Komodo juga menjadi pusat pengembangan pariwisata nasional dan internasional sehingga memiliki peranan penting dalam sektor konservasi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat lokal.

Gambar 4. 1 Peta Pulau Komodo



sumber: Goggle map

Pulau Komodo termasuk dalam kawasan Taman Nasional Komodo yang telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi nasional dan Situs Warisan Dunia UNESCO sejak tahun 1991. Penetapan tersebut menjadikan kawasan ini memperoleh perhatian internasional dalam upaya perlindungan lingkungan, pelestarian habitat komodo, serta pengembangan pariwisata berbasis konservasi. Keindahan alam yang dimiliki Pulau Komodo seperti padang savana, perbukitan, pantai berpasir putih dan merah muda (*pink beach*), serta kekayaan bawah laut menjadikan kawasan ini sebagai salah satu destinasi wisata unggulan Indonesia.

Secara geografis, Desa Komodo memiliki luas wilayah sekitar 34,76 km² sehingga menjadi salah satu desa dengan wilayah daratan yang cukup luas di Kecamatan Komodo karena mencakup area pulau dan kawasan pesisir. Kondisi geografis wilayah didominasi oleh perbukitan kering, padang savana, hutan tropis kering, serta wilayah laut yang kaya akan sumber daya perikanan dan biota laut. Iklim di wilayah ini cenderung panas dan kering dengan curah hujan yang relatif rendah dibandingkan daerah lain di Indonesia. Kondisi alam tersebut mempengaruhi pola kehidupan masyarakat yang sebagian besar menggantungkan hidup pada sektor kelautan dan pariwisata. Akses menuju Pulau Komodo sebagian besar menggunakan transportasi laut dari Labuan Bajo sebagai ibu kota Kecamatan Komodo sekaligus pusat aktivitas ekonomi dan pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat. Jarak Desa Komodo menuju Labuan Bajo sekitar ±38,5 kilometer dan umumnya ditempuh menggunakan kapal laut atau perahu motor. Kondisi geografis kepulauan menyebabkan mobilitas masyarakat masih sangat bergantung pada kondisi cuaca dan sarana transportasi laut.

Berdasarkan data kependudukan, jumlah penduduk Desa Komodo mencapai sekitar 1.719 jiwa yang terdiri atas 878 jiwa laki-laki dan 841 jiwa perempuan. Rasio jenis kelamin (sex ratio) sebesar 104,4 yang berarti terdapat sekitar 104 penduduk laki-laki dalam setiap 100 penduduk perempuan. Jumlah kepala keluarga di Desa Komodo sekitar 461 KK dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 49,45 jiwa/km². Jumlah penduduk tersebut tersebar di kawasan permukiman pesisir yang sebagian besar berada di Kampung Komodo sebagai pusat aktivitas masyarakat lokal. Mayoritas masyarakat Desa Komodo merupakan masyarakat lokal atau Suku Komodo yang telah hidup turun-temurun di kawasan tersebut dan memiliki hubungan erat dengan lingkungan alam sekitarnya. Kehidupan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis serta sumber daya alam yang tersedia. Sebelum berkembangnya sektor pariwisata, masyarakat umumnya bekerja sebagai nelayan tradisional yang mengandalkan hasil tangkapan laut sebagai sumber utama pendapatan keluarga. Aktivitas melaut dilakukan secara tradisional menggunakan perahu kecil dengan wilayah tangkap di sekitar perairan Pulau Komodo dan kawasan Taman Nasional Komodo.(BPS Manggarai Barat, 2017)

Seiring berkembangnya sektor pariwisata, terjadi perubahan pola mata pencaharian masyarakat. Saat ini masyarakat tidak hanya bekerja sebagai nelayan, tetapi juga mulai terlibat dalam sektor pariwisata seperti pemandu wisata lokal (local guide/ranger), pengrajin patung komodo dan suvenir, penyedia jasa transportasi laut, hingga usaha kecil yang berkaitan dengan kebutuhan wisatawan. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pariwisata memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Desa Komodo. Namun demikian, ketergantungan terhadap sektor wisata juga menyebabkan masyarakat menjadi rentan terhadap perubahan kebijakan pemerintah maupun kondisi pariwisata.

Dalam bidang fasilitas umum dan sosial, Desa Komodo memiliki beberapa sarana pendukung kehidupan masyarakat. Pada sektor pendidikan tersedia 1 unit Sekolah Dasar Negeri (SD Negeri) dan 1 unit Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP Negeri) sebagai fasilitas pendidikan dasar bagi masyarakat setempat. Dalam bidang kesehatan tersedia 1 unit Puskesmas Pembantu (Pustu) serta Posyandu yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat. Walaupun fasilitas tersebut telah tersedia, masyarakat masih menghadapi keterbatasan pelayanan kesehatan dan pendidikan karena kondisi geografis pulau yang cukup terpencil dibandingkan wilayah perkotaan. Pada aspek keagamaan, mayoritas masyarakat Kampung Komodo beragama Islam. Hal tersebut terlihat dari keberadaan 1 masjid besar yang menjadi pusat kegiatan ibadah dan aktivitas sosial masyarakat. Selain sebagai tempat ibadah, masjid juga menjadi tempat berkumpul masyarakat dalam kegiatan sosial, budaya, dan musyawarah desa. Kehidupan sosial masyarakat masih sangat dipengaruhi nilai gotong royong, hubungan kekeluargaan, dan adat istiadat lokal yang tetap dipertahankan hingga saat ini

Objek utama dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Komodo yang secara langsung merasakan dampak kebijakan pemerintah, khususnya kebijakan konservasi dan pengelolaan kawasan wisata di Pulau Komodo. Penelitian ini berfokus pada evaluasi dampak kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat lokal, terutama berkaitan dengan perubahan mata pencaharian, kondisi ekonomi, akses terhadap sumber daya alam, serta hubungan masyarakat dengan sektor pariwisata dan konservasi. Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan kawasan konservasi, termasuk implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015, memberikan pengaruh besar terhadap aktivitas masyarakat di Pulau Komodo. Kebijakan tersebut bertujuan menjaga kelestarian lingkungan dan habitat komodo melalui pembatasan aktivitas tertentu di kawasan konservasi. Namun di sisi lain, masyarakat menilai beberapa kebijakan tersebut juga berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, terutama nelayan tradisional yang akses penangkapannya menjadi lebih terbatas. Penelitian ini juga mengkaji hubungan antara pemerintah, pengelola taman nasional, pelaku usaha pariwisata, dan masyarakat lokal dalam pengelolaan Pulau Komodo. Konflik kepentingan antara konservasi lingkungan dan kebutuhan ekonomi masyarakat menjadi salah satu isu penting yang terus berkembang di kawasan ini. Pemerintah berupaya menjaga keberlanjutan ekosistem dan pariwisata, sementara masyarakat lokal membutuhkan akses terhadap sumber daya alam sebagai sumber penghidupan mereka.

Dengan berbagai karakteristik tersebut, Pulau Komodo menjadi objek penelitian yang sangat relevan dalam kajian evaluasi kebijakan publik, khususnya terkait dampak kebijakan konservasi dan pariwisata terhadap kesejahteraan masyarakat lokal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai kondisi masyarakat Suku Komodo sekaligus menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil, berkelanjutan, dan

mampu menyeimbangkan antara kepentingan pelestarian lingkungan dengan kesejahteraan masyarakat lokal.

4.1.2 PENYAJIAN DATA

4.1.2.1. Pemerintah Desa Komodo Membungkam Warga Desa Komodo Dengan Mengeliminasi Hak-Hak Penerimaan Bantuan Sosial

Penelitian lapangan di Pulau Komodo menemukan adanya kondisi di mana sebagian masyarakat terlihat enggan dan takut ketika diminta untuk diwawancarai terkait dampak kebijakan pemerintah dan perkembangan pariwisata di Pulau Komodo. Pada awal proses penelitian, peneliti mengalami kesulitan memperoleh informasi secara terbuka dari beberapa masyarakat karena mereka cenderung berhati-hati dalam memberikan jawaban, bahkan ada yang memilih menolak wawancara secara langsung.

Saat peneliti mencoba melakukan pendekatan kepada beberapa warga, sebagian masyarakat hanya memberikan jawaban singkat dan terlihat khawatir ketika pembahasan mulai berkaitan dengan kebijakan pemerintah, bantuan sosial, maupun dampak pariwisata terhadap kehidupan masyarakat lokal. Kondisi tersebut membuat proses pengumpulan data pada awal penelitian menjadi cukup sulit karena masyarakat belum sepenuhnya percaya untuk menyampaikan kondisi yang sebenarnya. Setelah peneliti melakukan pendekatan lebih lanjut secara perlahan kepada tokoh masyarakat dan beberapa warga setempat, akhirnya diketahui bahwa rasa takut masyarakat tersebut dipengaruhi oleh pengalaman yang pernah terjadi sebelumnya. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara informal, masyarakat menyampaikan bahwa pada tahun 2023 pernah ada beberapa warga Desa Komodo yang diwawancarai oleh pihak media mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap program pariwisata dan kebijakan pemerintah di Pulau Komodo.

Dalam wawancara tersebut, beberapa warga diketahui menyampaikan keluhan dan ketidakpuasan mereka terhadap kondisi ekonomi masyarakat serta dampak program pariwisata yang dianggap belum memberikan manfaat secara merata bagi masyarakat lokal.

Salah satu nelayan tradisional, om Irus:

> *Kami ini sebenarnya cuma mau hidup tenang saja, tapi kalau bicara terlalu jujur soal kondisi ekonomi, kami jadi takut. Apalagi setelah kejadian dulu itu, banyak yang bilang bantuannya jadi tidak ada lagi.*
> (Wawancara dilakukan tanggal 16 Maret 2026)

Senada dengan itu, nelayan lain yaitu bapak Bakri juga mengungkapkan:

> *Sekarang kami sudah hati-hati kalau ada orang datang wawancara. Takutnya nanti malah berdampak ke keluarga kami, jadi lebih baik diam saja daripada kena masalah.*
> (Wawancara dilakukan tanggal 16 Maret 2026)

Menurut penuturan masyarakat, setelah pemberitaan tersebut muncul, beberapa warga yang sebelumnya rutin menerima bantuan sosial mengaku tidak lagi mendapatkan bantuan hingga sekarang. Padahal sebagian dari mereka termasuk keluarga dengan kondisi ekonomi kurang mampu dan sangat membutuhkan bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Peristiwa tersebut kemudian menimbulkan rasa takut dan trauma di tengah masyarakat. praktik pembatasan ruang bicara masyarakat yang diduga dilakukan melalui tekanan sosial oleh pemerintah desa, terutama dalam konteks kritik terhadap kebijakan maupun distribusi bantuan sosial. Dalam situasi tertentu, masyarakat merasa bahwa penyampaian pendapat yang dianggap "berlawanan" dengan kebijakan dapat berimplikasi pada akses bantuan yang mereka terima. Kondisi ini menciptakan rasa takut dan membuat masyarakat cenderung memilih diam.

Akibat pengalaman tersebut, masyarakat menjadi lebih tertutup dan berhati-hati ketika ada pihak luar yang datang untuk melakukan wawancara atau meminta pendapat mengenai kondisi di Pulau Komodo. Beberapa masyarakat bahkan menyampaikan kepada peneliti bahwa mereka takut berbicara terlalu jujur karena khawatir nama mereka diketahui dan berdampak pada kehidupan keluarga mereka. Ada warga yang meminta agar identitas mereka tidak dicatat secara lengkap ketika wawancara dilakukan. Selain itu, sebagian masyarakat juga lebih memilih berbicara secara tidak formal dan meminta agar pembicaraan tidak direkam karena mereka merasa tidak aman jika pendapat mereka diketahui pihak tertentu.Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat rasa ketidakpercayaan dan kekhawatiran di tengah masyarakat dalam menyampaikan pendapat mengenai kebijakan pemerintah maupun pengelolaan pariwisata di Pulau Komodo, yang dalam konteks tertentu juga berkaitan dengan peran pemerintah desa dalam menjaga narasi positif pembangunan di wilayahnya. Situasi ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi peneliti dalam memperoleh data yang objektif dan mendalam karena masyarakat membutuhkan waktu untuk membangun rasa percaya sebelum bersedia memberikan informasi secara terbuka.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, peneliti berusaha melakukan pendekatan secara persuasif dan kekeluargaan kepada masyarakat agar mereka merasa lebih nyaman selama proses penelitian berlangsung. Peneliti juga menjelaskan bahwa tujuan penelitian dilakukan murni untuk kepentingan akademik dan identitas informan akan dijaga kerahasiaannya. Setelah dilakukan pendekatan secara bertahap, beberapa masyarakat akhirnya mulai bersedia menceritakan kondisi yang

mereka alami secara lebih terbuka. Dapat dilihat bahwa pengalaman masyarakat pada peristiwa sebelumnya telah mempengaruhi kondisi psikologis dan keberanian masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Rasa takut kehilangan bantuan sosial membuat sebagian masyarakat memilih diam dan enggan berbicara mengenai permasalahan yang mereka hadapi. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat miskin di Pulau Komodo berada dalam posisi yang cukup rentan karena ketergantungan mereka terhadap bantuan sosial dan keterbatasan ekonomi yang mereka miliki.

Berbeda dengan temuan tersebut, Kepala Desa Komodo memberikan pandangan yang berbeda terkait kondisi masyarakat. Dalam wawancara, Kepala Desa Komodo, pak Haji Aksan menyampaikan bahwa secara umum kondisi masyarakat Desa Komodo saat ini justru mengalami peningkatan kesejahteraan sejak berkembangnya sektor pariwisata di kawasan tersebut:

> *Kalau menurut saya, masyarakat di Desa Komodo sekarang jauh lebih sejahtera dibanding dulu. Dengan adanya pariwisata, banyak peluang kerja terbuka, ekonomi juga bergerak. Memang ada beberapa tantangan, tapi secara umum masyarakat sudah terbantu dengan adanya wisata ini.* (Wawancaradi lakukan tanggal 15 Maret 2026)

Lebih lanjut, Kepala Desa Komodo juga menilai bahwa beberapa isu atau permasalahan yang berkembang di tengah masyarakat tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Menurutnya, sebagian temuan atau anggapan yang menyatakan adanya penurunan kesejahteraan maupun tekanan sosial di Desa Komodo dianggap tidak tepat, karena saat ini aktivitas ekonomi masyarakat dinilai sudah bergerak dengan adanya sektor pariwisata. Dalam pandangan beliau, berbagai perubahan yang terjadi justru menunjukkan perkembangan positif sehingga isu-isu yang menyatakan kondisi masyarakat semakin terpuruk dianggap kurang relevan dengan situasi Desa Komodo saat ini.

Namun demikian, temuan peneliti juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan pihak Dinas Sosial. pak Marselinus Jebaru (Dinas Sosial) menyampaikan bahwa:

> *Kalau untuk bantuan sosial itu sejauh ini berjalan stabil setiap bulan di Desa Komodo. Soal adanya pembungkaman atau tekanan terhadap masyarakat, saya kurang mengetahui hal itu. Kami hanya menyalurkan bantuan sesuai data yang diajukan oleh pihak desa, jadi dari kami sifatnya mengikuti permintaan dan data yang masuk dari desa.*(Wawancara dilakukan tanggal 13 April 2026)

Rangkaian temuan ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara pemerintah desa, dinas terkait, dan masyarakat lokal terkait dampak perkembangan

pariwisata di Pulau Komodo, terutama dalam aspek kesejahteraan, akses ekonomi, serta kesempatan kerja. Perbedaan pandangan tersebut juga memperlihatkan adanya ketegangan sosial antara narasi resmi pemerintah dengan pengalaman langsung yang dirasakan oleh sebagian masyarakat lokal di lapangan. Di satu sisi pemerintah desa menilai bahwa masyarakat telah mengalami peningkatan kesejahteraan melalui sektor pariwisata, namun di sisi lain sebagian masyarakat masih merasakan keterbatasan ekonomi, sulitnya akses pekerjaan yang layak, hingga rasa takut dalam menyampaikan pendapat secara terbuka.

kondisi tersebut mengarah pada adanya praktik pembungkaman secara tidak langsung terhadap masyarakat yang dianggap terlalu terbuka dalam menyampaikan kritik maupun keluhan terkait kebijakan pemerintah dan pengelolaan pariwisata di Pulau Komodo. Praktik tersebut tidak selalu dilakukan dalam bentuk tindakan terbuka, melainkan melalui tekanan sosial dan rasa takut masyarakat terhadap kemungkinan kehilangan bantuan sosial maupun akses tertentu dari pemerintah desa. Situasi ini membuat sebagian masyarakat memilih diam dan menghindari pembicaraan mengenai persoalan yang mereka alami.

4.1.2.2. Sinergi Antar Instransi Pemerintahan Daerah Tidak Berjalan Untuk Menyelesaikan Problematik Warga Desa Komodo

Berdasarkan hasil temuan lapangan yang dilakukan peneliti di Pulau Komodo, ditemukan bahwa sinergi antarinstansi pemerintahan daerah dalam memahami dan menangani permasalahan masyarakat Desa Komodo belum berjalan secara maksimal. Kondisi tersebut terlihat dari lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah, khususnya dalam memperoleh data dan memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat secara langsung di lapangan. Akibatnya, berbagai persoalan yang dialami masyarakat sering kali tidak diketahui secara utuh oleh pemerintah daerah karena minimnya keterlibatan langsung instansi terkait di Desa Komodo.

Dalam hasil wawancara dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Barat, diketahui bahwa selama ini proses pendataan masyarakat penerima bantuan sosial maupun kondisi masyarakat Desa Komodo lebih banyak bergantung pada data yang dikirim oleh pemerintah desa. Dinas sosial mengaku jarang turun langsung ke Pulau Komodo untuk melakukan pengecekan kondisi masyarakat secara menyeluruh karena keterbatasan anggaran operasional dari pemerintah daerah.

Hal tersebut disampaikan oleh pak Marselinus Jebaru S.S selaku pihak Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Barat:

> *Kalau soal bantuan sosial itu kami biasanya menerima data dari pihak desa. Untuk turun langsung ke Pulau Komodo memang tidak selalu dilakukan karena sekarang anggaran daerah juga terbatas*

akibat efisiensi dana. Jadi banyak pendataan kami sesuaikan dengan data yang dikirim dari desa atau dari kecamatan.
(Wawancara dilakukan tanggal 14 April 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan minimnya kunjungan langsung dari instansi pemerintah daerah menyebabkan kondisi riil masyarakat di Desa Komodo tidak seluruhnya terpantau dengan baik. Pemerintah daerah cenderung hanya bergantung pada laporan administratif dari pemerintah desa tanpa melakukan verifikasi langsung secara menyeluruh terhadap kondisi masyarakat di lapangan. Akibatnya, beberapa persoalan sosial dan ekonomi masyarakat berpotensi tidak teridentifikasi secara maksimal oleh pemerintah daerah.

Selain itu, penelitian juga menemukan adanya perbedaan pandangan antara pemerintah daerah dengan kondisi yang dirasakan langsung oleh masyarakat Desa Komodo, khususnya dalam bidang pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat bernama Yopi Widiyanti, pemerintah daerah sebenarnya telah menyediakan berbagai program bantuan pendidikan dan beasiswa bagi masyarakat, termasuk untuk bidang pariwisata dan perguruan tinggi. Namun menurutnya, program tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat Desa Komodo.

Ibu Yopi Widiyanti S.E menyampaikan:

Sebenarnya banyak beasiswa yang sudah dibuat pemerintah daerah untuk anak-anak Komodo, baik di bidang pariwisata maupun perguruan tinggi lainnya. Tapi mungkin masyarakatnya kurang punya kesadaran untuk melanjutkan pendidikan atau bisa jadi mereka juga kurang tahu informasi itu. Saya juga bingung dengan pemerintahan desa di Pulau Komodo itu.
(Wawancara dilakukan tanggal 15 April 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa belum berjalan secara efektif, terutama dalam penyampaian informasi program pendidikan kepada masyarakat. Di satu sisi pemerintah daerah mengaku telah menyediakan berbagai bantuan pendidikan, namun di sisi lain masyarakat masih merasa akses pendidikan mereka sangat terbatas dan minim informasi terkait program-program tersebut. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan komunikasi dan lemahnya sinergi antarinstansi pemerintahan dalam menjangkau kebutuhan masyarakat Desa Komodo secara langsung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antar lembaga

pemerintah menyebabkan berbagai persoalan masyarakat Desa Komodo tidak tertangani secara menyeluruh. Pemerintah daerah, pemerintah desa, dan instansi terkait masih berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya sistem koordinasi yang kuat untuk memahami kondisi nyata masyarakat lokal. Akibatnya, berbagai program bantuan, pendidikan, maupun pemberdayaan masyarakat belum sepenuhnya tepat sasaran dan belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat Desa Komodo secara maksimal.

4.1.2.3. Persepsi Masyarakat terhadap Kurangnya Perhatian Pemerintah dan Dampaknya terhadap Urbanisasi Masyarakat Suku Komodo

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan di Pulau Komodo, ditemukan adanya perasaan kekecewaan dan ketidakpuasan yang cukup kuat di kalangan masyarakat terhadap perhatian pemerintah terhadap kondisi kehidupan masyarakat Suku Komodo. Sebagian besar informan menilai bahwa selama ini pembangunan yang dilakukan di kawasan Taman Nasional Komodo lebih banyak berfokus pada aspek konservasi dan pengembangan pariwisata, sementara persoalan-persoalan dasar yang dihadapi masyarakat lokal belum mendapatkan perhatian yang memadai. Kondisi tersebut menimbulkan persepsi di tengah masyarakat bahwa mereka semakin tersisih dari tanah kelahiran mereka sendiri dan tidak menjadi bagian utama dari pembangunan yang berlangsung di wilayah Pulau Komodo.

Masyarakat mengaku bahwa hingga saat ini masih banyak persoalan yang belum terselesaikan, mulai dari keterbatasan lahan permukiman, rendahnya akses pendidikan, minimnya lapangan pekerjaan, kurangnya pelatihan keterampilan, hingga terbatasnya fasilitas umum yang dapat menunjang kehidupan masyarakat. Di sisi lain, masyarakat melihat perkembangan sektor pariwisata yang terus meningkat setiap tahun dengan masuknya investor, pelaku usaha, dan tenaga kerja dari luar daerah. Kondisi tersebut menimbulkan perasaan ketidakadilan karena masyarakat lokal merasa belum memperoleh manfaat yang sebanding dengan perkembangan yang terjadi di wilayah mereka sendiri. Beberapa masyarakat bahkan mengungkapkan bahwa mereka jarang melihat pemerintah daerah hadir secara langsung untuk mendengarkan keluhan dan aspirasi masyarakat. Menurut mereka, kunjungan pejabat pemerintah ke Pulau Komodo umumnya lebih banyak berkaitan dengan kegiatan pariwisata dan konservasi dibandingkan upaya memahami persoalan sosial yang dihadapi masyarakat sehari-hari. Akibatnya, masyarakat merasa bahwa berbagai kebijakan yang diterapkan sering kali tidak sesuai dengan kondisi nyata yang mereka alami di lapangan.

Nelayan tradisional bernama Om Irus menjelaskan bahwa masyarakat sering merasa suara mereka tidak didengar dalam proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Pulau Komodo.

> *Kami sering merasa pemerintah tidak benar-benar tahu bagaimana kehidupan masyarakat di sini. Banyak masalah yang kami hadapi setiap hari, tetapi jarang ada yang datang untuk melihat langsung atau mendengar keluhan kami. Kami hidup berdampingan dengan aturan-aturan yang semakin banyak, tetapi kebutuhan masyarakat sendiri seperti pekerjaan, pendidikan, dan tempat tinggal masih belum mendapatkan perhatian yang cukup.*
> (Wawancara dilakukan tanggal 16 Maret 2026)

Menurut masyarakat, salah satu dampak yang paling nyata dari kondisi tersebut adalah semakin terbatasnya kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Meskipun Pulau Komodo telah menjadi salah satu destinasi wisata terkenal di Indonesia, masyarakat mengaku masih mengalami kesulitan memperoleh pekerjaan yang layak. Sebagian besar pekerjaan yang tersedia bagi masyarakat lokal masih berada pada sektor informal dengan pendapatan yang relatif rendah, seperti nelayan, pedagang kecil, buruh angkut, atau pekerjaan musiman yang bergantung pada kunjungan wisatawan. Sementara itu, pekerjaan yang membutuhkan keterampilan khusus dan menawarkan pendapatan lebih baik umumnya diisi oleh tenaga kerja dari luar daerah yang memiliki tingkat pendidikan dan kemampuan yang lebih tinggi. Kondisi tersebut membuat banyak generasi muda Suku Komodo merasa pesimis terhadap masa depan mereka apabila tetap tinggal di Pulau Komodo. Keterbatasan kesempatan kerja menyebabkan sebagian besar anak muda memilih merantau ke Labuan Bajo atau daerah lain untuk mencari pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik. Urbanisasi yang terjadi tidak lagi sekadar pilihan, tetapi mulai dipandang sebagai kebutuhan karena peluang untuk berkembang di kampung halaman mereka sendiri dinilai semakin terbatas.

Tour guide lokal bernama Kak Irsan menjelaskan bahwa banyak generasi muda mulai meninggalkan Pulau Komodo karena merasa tidak memiliki banyak pilihan untuk membangun masa depan di daerah asal mereka.

> *Anak-anak muda sekarang banyak yang memilih pergi ke Labuan Bajo karena merasa peluang hidup di sana lebih besar. Di Pulau Komodo pekerjaan masih sangat terbatas, sementara kebutuhan hidup terus meningkat. Kalau mereka tetap tinggal di sini, banyak yang bingung mau bekerja apa. Akhirnya mereka terpaksa mencari kehidupan di luar pulau*. (Wawancara dilakukan tanggal 17 Maret 2026)

Lebih jauh lagi, sebagian masyarakat menilai bahwa kondisi tersebut secara tidak langsung mendorong masyarakat lokal untuk meninggalkan Pulau Komodo. Meskipun tidak ada kebijakan yang secara langsung memerintahkan masyarakat untuk pindah, berbagai keterbatasan yang mereka alami membuat kehidupan di

Pulau Komodo semakin sulit dipertahankan. Keterbatasan lahan permukiman, rendahnya akses pendidikan, minimnya lapangan pekerjaan, dan ketatnya persaingan dengan tenaga kerja dari luar daerah dianggap sebagai faktor-faktor yang secara perlahan mendorong masyarakat untuk mencari kehidupan di tempat lain.

Penjual buah bernama Om Arsit mengungkapkan bahwa banyak masyarakat merasa semakin sulit bertahan hidup di tanah kelahiran mereka sendiri.

> *Kami lahir dan besar di Pulau Komodo, tetapi sekarang banyak orang merasa hidup di sini semakin susah. Kerja susah, pendidikan terbatas, lahan juga semakin sempit. Akhirnya banyak keluarga memilih pindah ke Labuan Bajo karena merasa lebih mudah mencari penghasilan di sana. Kami tidak ingin meninggalkan kampung sendiri, tetapi keadaan sering kali membuat kami tidak punya banyak pilihan.* (Wawancara dilakukan tanggal 18 Maret 2026)

Fenomena urbanisasi yang terjadi di kalangan masyarakat Suku Komodo menimbulkan kekhawatiran yang cukup besar terhadap keberlangsungan kehidupan sosial dan budaya masyarakat lokal. Masyarakat menyadari bahwa apabila semakin banyak generasi muda meninggalkan Pulau Komodo, maka proses pewarisan budaya, tradisi, bahasa lokal, serta nilai-nilai sosial yang selama ini diwariskan secara turun-temurun akan semakin melemah. Masyarakat khawatir bahwa suatu saat nanti Pulau Komodo hanya akan dikenal sebagai destinasi wisata dan kawasan konservasi, sementara keberadaan masyarakat asli yang telah hidup secara turun-temurun di wilayah tersebut semakin berkurang.

Selain itu, masyarakat juga menilai bahwa pembangunan yang berorientasi pada sektor pariwisata seharusnya tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan pembangunan infrastruktur wisata, tetapi juga harus memperhatikan kualitas hidup masyarakat lokal sebagai penghuni asli Pulau Komodo. Masyarakat berharap pemerintah dapat memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta penyelesaian persoalan ruang hidup masyarakat agar mereka dapat tetap bertahan dan berkembang di tanah leluhur mereka sendiri. Selain berbagai persoalan yang berkaitan dengan pendidikan, lapangan pekerjaan, dan keterbatasan ruang hidup, masyarakat juga menyampaikan kekecewaan terhadap minimnya kehadiran pemerintah, khususnya para wakil rakyat dari tingkat daerah hingga tingkat pusat, dalam mendengarkan secara langsung aspirasi masyarakat Pulau Komodo. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar informan mengaku jarang melihat anggota legislatif melakukan kunjungan langsung ke Pulau Komodo untuk berdialog dengan masyarakat mengenai berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Masyarakat menilai bahwa aspirasi mereka sering kali hanya dibahas dalam

forum-forum formal di luar pulau tanpa adanya upaya untuk memahami kondisi masyarakat secara langsung di lapangan.

Menurut masyarakat, kondisi geografis Pulau Komodo yang berada jauh dari pusat pemerintahan seharusnya menjadi alasan bagi pemerintah untuk lebih sering hadir dan melakukan komunikasi langsung dengan warga. Namun dalam kenyataannya, masyarakat merasa bahwa perhatian yang diberikan masih sangat terbatas. Akibatnya, berbagai persoalan yang telah lama mereka hadapi, seperti keterbatasan pendidikan, minimnya lapangan pekerjaan, persoalan lahan permukiman, serta rendahnya kualitas pelayanan publik, belum memperoleh solusi yang memadai.

Nelayan tradisional bernama Om Irus mengungkapkan bahwa masyarakat sering merasa tidak memiliki saluran yang efektif untuk menyampaikan keluhan mereka kepada pemerintah.

> *Kami jarang sekali melihat anggota dewan datang ke sini untuk mendengar langsung apa yang menjadi kesulitan masyarakat. Kalau ada masalah, masyarakat hanya bicara sesama warga karena tidak tahu harus menyampaikan kepada siapa. Banyak keputusan dibuat tentang Pulau Komodo, tetapi yang merasakan dampaknya justru kami yang tinggal di sini.*
>
> (Wawancara dilakukan tanggal 16 Maret 2026)

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Om Arsit, seorang penjual buah yang menilai bahwa kunjungan pemerintah ke Pulau Komodo masih sangat terbatas dibandingkan dengan besarnya perhatian yang diberikan terhadap potensi wisata di kawasan tersebut.

> *Pulau Komodo terkenal sampai ke seluruh dunia, tetapi kami sebagai masyarakat yang tinggal di sini merasa jarang didatangi untuk ditanya bagaimana keadaan kami sebenarnya. Banyak pejabat datang melihat wisata dan konservasi, tetapi tidak banyak yang duduk bersama masyarakat untuk mendengar langsung keluhan kami tentang pekerjaan, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari.*
>
> (Wawancara dilakukan tanggal 18 Maret 2026)

Masyarakat berharap pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, dapat lebih aktif melakukan kunjungan dan dialog langsung dengan warga Pulau Komodo. Menurut mereka, kehadiran pemerintah secara langsung sangat penting agar para pengambil kebijakan dapat memahami kondisi riil yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada

pengembangan pariwisata dan konservasi, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Suku Komodo sebagai penduduk asli yang telah lama hidup di kawasan tersebut.

Dalam perspektif masyarakat, minimnya komunikasi antara pemerintah dan warga Pulau Komodo telah menimbulkan perasaan bahwa mereka kurang dilibatkan dalam proses pembangunan yang berlangsung di wilayah mereka sendiri. Kondisi ini kemudian memperkuat persepsi masyarakat bahwa berbagai kebijakan yang diterapkan belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat lokal. Akibatnya, sebagian masyarakat merasa semakin terpinggirkan dan khawatir terhadap masa depan generasi penerus mereka di Pulau Komodo.

4.1.2.4. Dampak Ekonomi Yang di Rasakan Oleh Masyarakat Pulau Komodo

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Pulau Komodo, ditemukan bahwa salah satu permasalahan ekonomi yang paling dirasakan oleh masyarakat Suku Komodo adalah sulitnya memperoleh akses pinjaman modal untuk mengembangkan usaha dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Kondisi tersebut berkaitan erat dengan status kepemilikan tanah masyarakat yang sebagian besar telah masuk dalam pengelolaan pemerintah pusat melalui kawasan konservasi Taman Nasional Komodo. Banyak masyarakat tidak memiliki sertifikat tanah pribadi meskipun mereka telah tinggal secara turun-temurun di Pulau Komodo sejak zaman nenek moyang mereka. Setelah kawasan Pulau Komodo berada dalam pengelolaan taman nasional, masyarakat tidak lagi memiliki kebebasan penuh terhadap lahan yang mereka tempati. Akibatnya, sebagian besar masyarakat tidak memiliki dokumen kepemilikan tanah resmi yang dapat dijadikan aset atau jaminan ketika ingin mengajukan pinjaman modal ke bank.

Penjual buah yang bernama om Arsit menjelaskan bahwa persoalan kepemilikan tanah menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi masyarakat saat ini. Ia menyampaikan bahwa sebagian besar masyarakat sebenarnya ingin berkembang dan membangun usaha sendiri, namun terkendala persoalan legalitas tanah dan akses modal usaha.

> *Kami di sini kebanyakan tidak punya sertifikat tanah karena kawasan ini masuk taman nasional. Jadi kalau kami pinjam uang di bank untuk tambah usaha, beli kapal, atau buka usaha wisata itu sangat sulit. Akhirnya kami hanya bisa usaha kecil-kecilan saja. Kalau mau pinjam ke pihak lain atau swasta bunganya tinggi dan memberatkan masyarakat.*
> (Wawancara di lakukan tanggal 18 Maret 2026)

Masyarakat menyampaikan bahwa kondisi tersebut membuat mereka sangat kesulitan memperoleh bantuan modal usaha dalam jumlah besar. Dalam sistem

perbankan, sertifikat tanah menjadi salah satu syarat utama untuk memperoleh pinjaman. Namun karena masyarakat tidak memiliki tanah pribadi yang diakui secara resmi, pengajuan pinjaman mereka sering kali tidak dapat diproses atau ditolak oleh pihak bank. Kondisi ini menyebabkan masyarakat kehilangan kesempatan untuk mengembangkan usaha ekonomi mereka. Beberapa masyarakat mengaku sebenarnya memiliki keinginan untuk membeli kapal nelayan yang lebih besar, memperbaiki mesin kapal, membuka usaha wisata kecil, memperluas usaha dagang, maupun membangun penginapan sederhana bagi wisatawan. Akan tetapi keterbatasan akses modal membuat keinginan tersebut sulit diwujudkan. Akibatnya, masyarakat hanya mampu menjalankan usaha dalam skala kecil dengan penghasilan yang terbatas.

Tour guide lokal bernama kak Irsan juga menyampaikan bahwa keterbatasan modal membuat masyarakat lokal sulit berkembang dalam sektor pariwisata yang saat ini berkembang pesat di Pulau Komodo. Menurutnya, masyarakat lokal sebenarnya memiliki keinginan untuk ikut maju dalam dunia wisata, namun mereka kalah bersaing dengan pihak luar yang memiliki modal dan pendidikan lebih baik.

> *Wisata memang ramai sekarang dan turis terus datang, tapi masyarakat lokal susah ikut berkembang karena modal mereka terbatas. Yang punya usaha besar kebanyakan orang luar karena mereka punya uang dan pengalaman usaha lebih bagus. Masyarakat sini sebenarnya mau berkembang juga, tapi akses modal mereka sangat sulit karena tidak punya jaminan untuk pinjam di bank.*(Wawancara di lakukan 17 Maret 2026)

Selain persoalan akses modal, penelitian ini juga menemukan bahwa masyarakat mengalami keterbatasan dalam pilihan mata pencaharian. Sebelum kawasan konservasi berkembang seperti saat ini, sebagian masyarakat masih dapat melakukan aktivitas berkebun kecil maupun beternak secara sederhana untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun setelah wilayah Pulau Komodo berada dalam pengawasan kawasan konservasi, masyarakat tidak lagi bebas membuka lahan untuk pertanian dan peternakan karena adanya pembatasan penggunaan kawasan. Masyarakat menyampaikan bahwa saat ini mereka hampir tidak memiliki pilihan pekerjaan lain selain menjadi nelayan atau bergantung pada sektor pariwisata. Kondisi tersebut menyebabkan sumber penghasilan masyarakat menjadi sangat terbatas. Ketika hasil tangkapan ikan menurun atau jumlah wisatawan berkurang, maka kondisi ekonomi masyarakat langsung terdampak karena tidak ada sektor pekerjaan lain yang dapat dijadikan sumber pendapatan tambahan.

Nelayan tradisional bernama om Irus menjelaskan bahwa kehidupan masyarakat saat ini sangat bergantung pada kondisi laut dan wisata karena mereka tidak lagi memiliki pilihan pekerjaan lain seperti dahulu.

Sekarang kami cuma bisa berharap dari laut atau wisata. Dulu masyarakat masih bisa berkebun kecil atau pelihara ternak untuk bantu kebutuhan keluarga, tapi sekarang sudah susah karena ada aturan kawasan. Kalau ikan sedikit atau wisata sepi, masyarakat langsung susah karena memang tidak ada kerja lain lagi.
(Wawancara dilakukan tanggal 16 Maret 2026)

Ketergantungan terhadap sektor nelayan dan pariwisata juga membuat masyarakat berada dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil. Dalam sektor perikanan, masyarakat menghadapi berbagai kesulitan seperti pembatasan wilayah tangkap, tingginya biaya operasional melaut, serta risiko keselamatan di laut lepas. Nelayan harus melaut lebih jauh ke tengah laut untuk mendapatkan hasil tangkapan ikan karena beberapa wilayah perairan di sekitar Pulau Komodo telah menjadi kawasan konservasi yang tidak boleh digunakan untuk menangkap ikan. Kondisi tersebut menyebabkan penggunaan bahan bakar menjadi lebih banyak dan masyarakat harus menggunakan kapal yang lebih besar agar mampu menghadapi ombak besar di laut lepas.

Nelayan tradisional bernama pak Bakri menjelaskan bahwa pekerjaan sebagai nelayan saat ini jauh lebih berat dibandingkan sebelumnya karena biaya melaut semakin tinggi sementara hasil tangkapan tidak selalu mencukupi kebutuhan keluarga.

Sekarang kalau melaut harus jauh ke tengah laut. Ombak besar, bensin mahal, kadang hasil ikan tidak cukup untuk bayar biaya. Kami juga takut kalau cuaca buruk karena kapal kecil susah lawan ombak besar. Tapi mau bagaimana lagi, kami tetap harus melaut untuk cari makan keluarga.
(Wawancara dilakukan tanggal 16 Maret 2026)

Selain nelayan, dampak kebijakan konservasi juga dirasakan oleh masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari usaha perdagangan sederhana. Penjual buah bernama om Arsit yang sebelumnya bekerja sebagai nelayan menjelaskan bahwa masyarakat sekarang tidak lagi bebas mengambil hasil hutan di Pulau Komodo untuk dijadikan bahan dagangan maupun kebutuhan sehari-hari. Akibatnya, masyarakat harus membeli barang dagangan dari luar pulau seperti Labuan Bajo dengan biaya yang lebih mahal.

Sekarang susah cari bahan jualan di pulau sendiri karena tidak bisa ambil dari hutan lagi. Jadi kami harus beli buah dari Labuan Bajo dan itu jatuhnya lebih mahal lagi. Makanya jangan heran kalau harga buah di sini mahal-mahal. Tapi mau bagaimana lagi, demi menyambung kehidupan keluarga saya harus tetap usaha

walaupun untungnya kecil.
(Wawancaradi lakukan tanggal 18 Maret 2026)

Om Arsit juga menjelaskan bahwa dirinya memutuskan berhenti menjadi nelayan karena biaya melaut sudah terlalu besar dan risiko keselamatan di laut semakin tinggi.

Saya berhenti melaut karena biaya terlalu besar dan risikonya tinggi. Sekarang saya jual buah walaupun penghasilannya kecil. Setidaknya saya tidak perlu lagi hadapi ombak besar di tengah laut seperti waktu masih jadi nelayan dulu.
(Wawancara di lakukan tanggal 18 Maret 2026)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa minimnya pilihan mata pencaharian menyebabkan masyarakat menjadi semakin rentan secara ekonomi. Masyarakat merasa kehidupan mereka sangat bergantung pada kondisi laut dan perkembangan wisata di Pulau Komodo. Ketika kedua sektor tersebut mengalami masalah, masyarakat tidak memiliki alternatif pekerjaan lain untuk mempertahankan kondisi ekonomi keluarga mereka. Pengambilalihan kawasan oleh pemerintah pusat melalui pengelolaan konservasi memberikan dampak ekonomi yang cukup besar terhadap masyarakat Suku Komodo. Masyarakat mengalami kesulitan memperoleh akses pinjaman modal karena tidak memiliki tanah pribadi yang dapat dijadikan jaminan di bank. Selain itu, masyarakat juga tidak lagi bebas melakukan aktivitas bertani dan beternak sehingga pilihan mata pencaharian mereka menjadi sangat terbatas dan hanya bergantung pada sektor nelayan dan pariwisata sebagai sumber utama penghasilan keluarga.

Gambar 4. 2 Perahu Nelayan dan Penjual Buah Keliling Pulau





Sumber: Dokumentasi Penelitian

4.1.2.5. Dampak Sosial Budaya Dari Kebijakan PP No. 108 Tahun 2015

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Pulau Komodo, ditemukan bahwa kebijakan pengelolaan kawasan konservasi dan perkembangan pariwisata tidak hanya memberikan dampak ekonomi terhadap masyarakat Suku Komodo, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan budaya yang cukup besar terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat lokal. Dampak tersebut berkaitan dengan keterbatasan ruang hidup masyarakat, kekhawatiran terhadap hilangnya identitas budaya Suku Komodo, hingga ketidakpastian masa depan generasi muda di Pulau Komodo. Semakin padatnya wilayah permukiman masyarakat di Desa Komodo menjadi salah satu persoalan yang paling dirasakan masyarakat saat ini. Berdasarkan hasil observasi lapangan, rumah-rumah masyarakat dibangun sangat berdekatan karena masyarakat tidak lagi memiliki ruang yang cukup untuk memperluas wilayah permukiman. Sebagian besar wilayah di Pulau Komodo saat ini berada dalam kawasan konservasi Taman Nasional Komodo sehingga masyarakat tidak bebas membuka lahan baru untuk kebutuhan tempat tinggal keluarga mereka.

Nelayan tradisional yang bernama Kak Irus menjelaskan bahwa keterbatasan ruang hidup masyarakat mulai menjadi persoalan serius karena jumlah penduduk terus bertambah setiap tahun sementara wilayah permukiman tidak mengalami perluasan.

> *Wilayah permukiman masyarakat sekarang sudah padat dan masyarakat khawatir anak cucunya nanti tidak punya tempat tinggal lagi. Banyak keluarga baru yang sudah mulai kesulitan cari lahan untuk bangun rumah karena hampir semua wilayah masuk kawasan konservasi. Kalau kondisi ini terus begini, lama-lama generasi muda bisa terpaksa keluar dari Pulau Komodo untuk cari tempat tinggal di luar.*
>
> (Wawancara dilakukan tanggal 16 Maret 2026)

Masyarakat menyampaikan bahwa kondisi tersebut menjadi persoalan serius bagi kehidupan generasi muda Suku Komodo. Banyak warga merasa khawatir karena suatu saat nanti anak cucu mereka tidak lagi memiliki tempat tinggal di Pulau Komodo ketika sudah menikah dan membangun keluarga sendiri. Keterbatasan lahan membuat masyarakat kesulitan menyediakan ruang hidup baru bagi anggota keluarga yang terus bertambah setiap tahunnya. Akibat kondisi tersebut, sebagian generasi muda mulai terpaksa pergi ke luar Pulau Komodo seperti ke Labuan Bajo atau daerah lain di Manggarai Barat untuk mencari tempat tinggal dan pekerjaan yang lebih memungkinkan. Kondisi tersebut menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat bahwa suatu saat nanti anak cucu mereka akan meninggalkan tanah kelahiran mereka sendiri karena sudah tidak tersedia ruang hidup yang cukup di Pulau Komodo.

Tour guide lokal bernama Kak Irsan menyampaikan bahwa dirinya melihat banyak anak muda mulai memilih meninggalkan Pulau Komodo karena merasa sulit memperoleh pekerjaan dan masa depan yang layak di kampung halaman mereka sendiri.

> *Kalau anak-anak muda terus keluar dari pulau karena kerja dan sekolah susah, lama-lama budaya asli di sini bisa hilang. Sekarang saja sudah banyak yang pergi ke Labuan Bajo cari kerja karena di sini kesempatan masih terbatas. Padahal kalau generasi mudanya terus pergi, siapa lagi yang nanti lanjutkan budaya dan kehidupan masyarakat Komodo di pulau ini.*
> (Wawancara dilakukan tanggal 17 Maret 2026)

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan adanya kecenderungan urbanisasi yang terjadi pada masyarakat Pulau Komodo. Urbanisasi ini tidak hanya muncul karena faktor ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan pembangunan daerah yang lebih banyak terpusat di Labuan Bajo sebagai pusat pariwisata dan pelayanan publik di Kabupaten Manggarai Barat. Kondisi tersebut secara tidak langsung mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, untuk berpindah ke wilayah perkotaan guna memperoleh akses pendidikan, pekerjaan, pelayanan kesehatan, serta peluang usaha yang lebih baik. Masyarakat menilai bahwa pembangunan yang terpusat di Labuan Bajo menyebabkan Pulau Komodo semakin tertinggal dari sisi fasilitas pendukung kehidupan masyarakat.

Nelayan tradisional Kak Irus mengungkapkan bahwa banyak warga mulai meninggalkan Pulau Komodo karena berbagai kebutuhan hidup lebih mudah diperoleh di Labuan Bajo dibandingkan di kampung mereka sendiri.

> *Sekarang banyak anak muda memilih tinggal di Labuan Bajo karena di sana sekolah lebih lengkap, pekerjaan lebih banyak, dan*

fasilitas juga lebih baik. Pemerintah banyak bangun di Labuan Bajo sehingga masyarakat merasa harus pindah ke sana kalau mau cari masa depan yang lebih baik. Akibatnya kampung ini perlahan mulai ditinggalkan oleh generasi mudanya.
(Wawancara dilakukan tanggal 16 Maret 2026)

Hal serupa juga disampaikan oleh seorang penjual buah di Desa Komodo yang melihat semakin banyak keluarga memilih menetap di Labuan Bajo karena alasan ekonomi dan pendidikan anak-anak mereka.

Banyak keluarga sekarang lebih memilih tinggal di Labuan Bajo karena anak-anak bisa sekolah lebih mudah dan orang tua juga lebih gampang cari penghasilan. Kami khawatir kalau keadaan seperti ini terus berlangsung, masyarakat Komodo semakin sedikit yang tinggal di pulau sendiri. Nanti budaya dan kebiasaan yang selama ini dijaga bisa perlahan hilang karena generasi mudanya sudah banyak menetap di luar.
(Wawancara dilakukan tanggal 18 Maret 2026)

Fenomena urbanisasi tersebut menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap keberlangsungan identitas budaya Suku Komodo. Berkurangnya jumlah generasi muda yang tinggal di Pulau Komodo dikhawatirkan akan mengurangi proses pewarisan nilai-nilai budaya, tradisi, bahasa lokal, serta pengetahuan tradisional yang selama ini diwariskan secara turun-temurun. Apabila kondisi ini terus berlangsung tanpa adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, lapangan pekerjaan, dan ruang hidup masyarakat di Pulau Komodo, maka urbanisasi berpotensi mempercepat perubahan sosial yang dapat mengancam keberlanjutan budaya masyarakat Suku Komodo di masa mendatang.

Masyarakat sebenarnya tidak rela jika generasi penerus mereka harus meninggalkan Pulau Komodo. Bagi masyarakat lokal, Pulau Komodo bukan hanya sekadar tempat tinggal, tetapi juga bagian dari identitas dan kehidupan budaya mereka sejak dahulu. Masyarakat Suku Komodo memiliki hubungan emosional dan historis yang sangat kuat dengan tanah, laut, dan lingkungan Pulau Komodo karena mereka telah hidup berdampingan dengan alam dan satwa komodo secara turun-temurun. Dalam hasil wawancara, beberapa masyarakat menyampaikan bahwa komodo bukan hanya dianggap sebagai hewan biasa, tetapi telah lama dipandang sebagai bagian dari kehidupan dan "saudara" mereka sendiri. Kepercayaan dan cerita turun-temurun mengenai hubungan masyarakat dengan komodo masih hidup dalam kehidupan sosial masyarakat hingga saat ini. Kondisi inilah yang membuat masyarakat merasa bahwa perpindahan penduduk secara terus-menerus ke wilayah perkotaan bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut keberlangsungan identitas budaya dan eksistensi masyarakat Suku Komodo di tanah

leluhur mereka sendiri.

Salah satu nelayan tradisional bernama om Irus menjelaskan bahwa masyarakat Komodo sejak dahulu hidup berdampingan dengan satwa komodo dan memiliki hubungan batin yang kuat dengan lingkungan di Pulau Komodo.

> *Dari dulu kami hidup sama komodo di pulau ini. Kami sudah anggap mereka bagian dari kehidupan kami. Orang tua dulu selalu bilang kalau komodo itu bukan cuma hewan liar, tapi sudah seperti saudara yang hidup bersama kami di tanah ini. Jadi kalau suatu saat masyarakat Komodo hilang dari sini, rasanya seperti hilang juga sejarah dan kehidupan yang sudah dijaga turun-temurun.*
> (Wawancara di lakukan Tanggal 16 Maret 2026)

Oleh karena itu, masyarakat merasa sedih dan khawatir apabila suatu saat nanti generasi Suku Komodo tidak lagi tinggal di Pulau Komodo karena kondisi tersebut dianggap dapat menghilangkan hubungan sejarah dan budaya yang telah terjaga sejak lama. Adanya kekhawatiran masyarakat terhadap hilangnya identitas Suku Komodo di tanah mereka sendiri juga semakin kuat seiring berkembangnya sektor pariwisata dan masuknya banyak pihak luar ke kawasan Pulau Komodo. Masyarakat merasa bahwa perkembangan kawasan wisata secara perlahan dapat menggeser keberadaan masyarakat lokal apabila tidak diimbangi dengan perlindungan terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat asli.

Seorang nelayan tradisional bernama bapak Bakri menyampaikan bahwa masyarakat takut suatu saat Pulau Komodo hanya dikenal sebagai tempat wisata internasional tanpa lagi memiliki kehidupan masyarakat asli Suku Komodo.

> *Kami tidak rela kalau suatu saat orang Komodo hilang dari pulau ini. Sekarang wisata memang makin besar dan orang luar makin banyak datang, tapi kami takut nanti masyarakat asli malah tersingkir di tanah sendiri. Pulau ini bukan cuma tempat wisata, tapi tempat hidup nenek moyang kami dari dulu.*
> (Wawancara dilakukan tanggal 16 Maret 2026)

Kekhawatiran tersebut semakin besar karena masyarakat merasa pilihan pekerjaan yang tersedia saat ini sangat terbatas dan tidak semuanya sesuai dengan kemampuan masyarakat lokal. Setelah masyarakat tidak lagi bebas bertani dan beternak akibat keterbatasan lahan dan aturan kawasan konservasi, sebagian besar masyarakat hanya dapat bergantung pada pekerjaan sebagai nelayan atau pekerjaan di sektor pariwisata. Namun pada kenyataannya, tidak semua masyarakat mampu bekerja di sektor pariwisata karena minimnya pendidikan, keterampilan, dan kemampuan bahasa asing yang dibutuhkan dalam industri wisata modern.

Akibatnya, banyak masyarakat terutama generasi muda mengalami kesulitan memperoleh pekerjaan yang stabil dan sesuai dengan kondisi mereka.

Tour guide lokal bernama kak Irsan menjelaskan bahwa banyak anak muda lokal sebenarnya memiliki keinginan untuk maju di sektor pariwisata, namun kalah bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah karena keterbatasan pendidikan dan keterampilan.

> *Banyak anak muda di sini sebenarnya mau maju di pariwisata, tapi mereka kalah pendidikan dan skill dengan orang luar. Orang luar datang sudah punya pengalaman, bisa bahasa asing, dan punya sertifikat pelatihan. Sementara anak-anak sini kebanyakan cuma lulusan SMP atau SMA, jadi susah bersaing untuk dapat pekerjaan yang lebih bagus.*
> (Wawancara dilakukan tanggal 17 Maret 2026)

Akibat kondisi tersebut, sebagian masyarakat akhirnya memilih meninggalkan Pulau Komodo untuk mencari pekerjaan di luar daerah karena merasa peluang kerja di kampung mereka sendiri semakin terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan konservasi dan pariwisata di Pulau Komodo tidak hanya membawa perubahan ekonomi, tetapi juga mempengaruhi keberlangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat Suku Komodo sebagai penduduk asli kawasan tersebut.

Gambar 4. 3 Desa Komodo





Sumber : Goggle Foto

4.2.1.6. Warga Desa Komodo Sulit Bersaing di Dunia Pariwisata

Berdasarkan temuan lapangan yang dilakukan di Pulau Komodo, ditemukan bahwa kondisi pendidikan masyarakat di Desa Komodo masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dari segi infrastruktur pendidikan, akses pendidikan lanjutan, dan minimnya pelatihan keterampilan bagi masyarakat lokal. Kondisi tersebut memberikan dampak yang cukup besar terhadap kualitas sumber daya manusia masyarakat Suku Komodo serta mempengaruhi kemampuan mereka dalam bersaing di sektor pariwisata yang terus berkembang di Pulau Komodo. Fasilitas pendidikan di Desa Komodo masih sangat terbatas. Di desa tersebut hanya tersedia Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagai sarana pendidikan formal bagi masyarakat setempat. Sementara untuk melanjutkan pendidikan ke

tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun perguruan tinggi, masyarakat harus keluar dari Pulau Komodo menuju Labuan Bajo atau daerah lain di luar pulau.

Tour guide yang bernama kak Irsan menjelaskan bahwa keterbatasan fasilitas pendidikan menjadi salah satu persoalan utama yang dihadapi masyarakat hingga saat ini. Menurutnya, banyak anak muda sebenarnya memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan, namun terkendala biaya dan akses yang sulit karena harus keluar pulau.

> *Di sini hanya ada SD dan SMP, jadi kalau anak-anak mau lanjut SMA atau kuliah mereka harus keluar pulau ke Labuan Bajo atau daerah lain. Masalahnya tidak semua orang tua mampu biayai anak tinggal di luar. Biaya makan, tempat tinggal, dan transportasi cukup berat bagi masyarakat sini yang kebanyakan hidup sebagai nelayan. Karena itu banyak anak akhirnya berhenti sekolah setelah SMP*. (Wawancara dilakukan tanggal 18 Maret 2026)

Kondisi geografis Pulau Komodo yang terpisah dari pusat kota membuat akses pendidikan lanjutan menjadi cukup sulit bagi masyarakat. Untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, siswa harus tinggal di luar pulau dan membutuhkan biaya tambahan untuk transportasi, tempat tinggal, makan, dan kebutuhan pendidikan lainnya. Bagi sebagian besar masyarakat yang hidup dengan kondisi ekonomi terbatas, biaya tersebut dianggap sangat berat sehingga tidak semua keluarga mampu menyekolahkan anak-anak mereka ke luar Pulau Komodo. Banyak anak muda di Desa Komodo akhirnya terpaksa berhenti sekolah setelah lulus SMP karena keterbatasan ekonomi keluarga. Bahkan ditemukan juga beberapa anak yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar hingga tamat SD karena harus membantu orang tua bekerja atau terkendala kondisi ekonomi. Sebagian besar anak muda akhirnya memilih bekerja sebagai nelayan, membantu usaha keluarga, atau terlibat dalam pekerjaan informal sejak usia muda dibandingkan melanjutkan pendidikan.

Nelayan tradisional bernama om Irus menjelaskan bahwa kondisi ekonomi keluarga menjadi salah satu alasan utama banyak anak muda tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

> *Banyak anak-anak di sini sebenarnya mau sekolah tinggi, tapi orang tua mereka tidak mampu biayai kalau harus keluar pulau. Jadi setelah SMP mereka lebih pilih bantu orang tua melaut atau kerja apa saja untuk tambah penghasilan keluarga. Ada juga yang dari kecil sudah ikut cari ikan karena kondisi ekonomi memang susah.* (Wawancara di lakukan tanggal 16 Maret 2026)

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat Suku Komodo saat ini. Keterbatasan pendidikan menyebabkan masyarakat lokal mengalami kesulitan untuk bersaing dalam dunia kerja, terutama di sektor pariwisata yang berkembang pesat di Pulau Komodo. Industri pariwisata modern menuntut kemampuan tertentu seperti komunikasi yang baik, kemampuan bahasa asing, pelayanan wisata, penggunaan teknologi, hingga pengetahuan mengenai manajemen usaha wisata. Namun pada kenyataannya, sebagian besar masyarakat lokal belum memiliki kemampuan tersebut karena rendahnya akses pendidikan yang mereka peroleh.

Tour guide lokal bernama kak Irsan menjelaskan bahwa banyak anak muda lokal sebenarnya memiliki keinginan untuk maju di sektor pariwisata, namun mereka kalah bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah karena keterbatasan pendidikan dan keterampilan.

> *Banyak anak muda di sini sebenarnya mau maju di pariwisata, tapi mereka kalah pendidikan dan skill dengan orang luar. Orang luar datang sudah bisa bahasa Inggris, punya pengalaman kerja, dan lebih paham dunia wisata. Sementara anak-anak sini kebanyakan hanya lulusan SMP atau SMA, jadi susah bersaing untuk dapat pekerjaan yang lebih bagus di sektor wisata.*
> *(*Wawancara dilakukan tanggal 17 Maret 2026)

Masyarakat mengaku sering kalah bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, kemampuan bahasa asing yang lebih baik, serta pengalaman kerja yang lebih memadai di bidang pariwisata. Akibatnya, peluang kerja yang baik di sektor pariwisata lebih banyak diperoleh oleh orang luar dibandingkan masyarakat lokal sendiri. Beberapa masyarakat menyampaikan bahwa mereka sebenarnya memiliki keinginan untuk terlibat lebih besar dalam pengelolaan pariwisata di Pulau Komodo, namun keterbatasan pendidikan membuat mereka sulit mengikuti perkembangan dunia wisata yang semakin modern. Banyak masyarakat lokal akhirnya hanya bekerja pada sektor-sektor kecil dengan penghasilan terbatas, sementara posisi kerja yang lebih baik dan usaha wisata yang lebih besar dikelola oleh pihak luar.

Penjual buah bernama om Arsit yang sebelumnya bekerja sebagai nelayan juga menyampaikan bahwa rendahnya pendidikan membuat masyarakat lokal sulit berkembang dan hanya mampu bekerja pada sektor-sektor kecil.

> *Kalau pendidikan masyarakat lebih bagus mungkin kami juga bisa ikut berkembang di wisata. Tapi kenyataannya banyak orang sini tidak punya skill dan bahasa asing, jadi susah bersaing dengan orang luar. Akhirnya masyarakat lokal hanya kerja kecil-*

kecilan atau jadi buruh saja sementara usaha besar dipegang orang luar.
(Wawancara dilakukan tanggal 18 Maret 2026)

Selain keterbatasan pendidikan formal, penelitian ini juga menemukan bahwa pelatihan keterampilan dari pemerintah bagi masyarakat lokal masih sangat minim dan belum berjalan secara maksimal. Masyarakat menyampaikan bahwa hingga saat ini belum banyak program pelatihan yang benar-benar mampu mempersiapkan masyarakat untuk bersaing di dunia pariwisata. Beberapa pelatihan yang pernah diberikan dinilai hanya bersifat sementara dan belum menyentuh seluruh masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat juga mengaku belum mendapatkan pelatihan yang memadai terkait kemampuan bahasa asing, pelayanan wisata, pengelolaan usaha wisata, maupun keterampilan lain yang dibutuhkan dalam industri pariwisata. Padahal kemampuan tersebut dianggap sangat penting agar masyarakat lokal dapat bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah yang memiliki pendidikan dan keterampilan lebih baik.

Tour guide lokal bernama om Irsan menjelaskan bahwa minimnya pelatihan menjadi salah satu penyebab masyarakat lokal sulit berkembang dalam sektor pariwisata.

Masyarakat sini jarang dapat pelatihan bahasa asing atau pelatihan wisata yang benar-benar membantu. Kalau ada pelatihan biasanya hanya sebentar dan tidak semua masyarakat ikut. Padahal kalau ada pelatihan yang serius mungkin anak-anak muda di sini bisa lebih maju dan tidak kalah sama orang luar.
(Wawancara dilakukan tanggal 17 Maret 2026)

Minimnya perhatian terhadap pendidikan dan pelatihan masyarakat lokal menyebabkan ketimpangan kemampuan antara masyarakat Suku Komodo dengan pendatang dari luar daerah. Kondisi tersebut membuat masyarakat lokal semakin tertinggal dalam memanfaatkan peluang ekonomi dari perkembangan pariwisata di daerah mereka sendiri. Selain berdampak pada sektor pekerjaan, rendahnya tingkat pendidikan juga mempengaruhi cara masyarakat menghadapi perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi di Pulau Komodo.

Selain keterbatasan pendidikan dan minimnya pelatihan keterampilan, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat Suku Komodo harus menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan tenaga kerja dan pelaku usaha yang berasal dari luar Pulau Komodo. Perkembangan sektor pariwisata yang pesat telah menarik banyak pendatang dari berbagai daerah untuk bekerja maupun membuka usaha di kawasan wisata Komodo. Tidak hanya berasal dari Labuan Bajo, tetapi juga dari berbagai wilayah lain di Nusa Tenggara Timur, bahkan dari Pulau Jawa yang memiliki sumber daya manusia dengan tingkat pendidikan, keterampilan, dan

pengalaman kerja yang lebih tinggi.

Kondisi tersebut menimbulkan tantangan tersendiri bagi masyarakat lokal. Banyak masyarakat mengaku bahwa mereka sering kalah bersaing dalam memperoleh pekerjaan di sektor pariwisata karena keterbatasan pendidikan, kemampuan bahasa asing, serta pengalaman kerja yang dimiliki. Sementara itu, para pendatang umumnya telah memiliki keterampilan yang lebih sesuai dengan kebutuhan industri pariwisata modern seperti kemampuan berbahasa Inggris, penguasaan teknologi informasi, pelayanan wisata, pemasaran digital, dan manajemen usaha. Akibatnya, banyak posisi pekerjaan yang dianggap strategis dan memiliki pendapatan lebih baik justru diisi oleh tenaga kerja dari luar daerah.

Tour guide lokal bernama Kak Irsan menjelaskan bahwa persaingan dengan tenaga kerja dari luar Pulau Komodo semakin terasa dalam beberapa tahun terakhir seiring berkembangnya industri pariwisata.

> *Sekarang yang datang bekerja di sektor wisata bukan hanya orang Labuan Bajo, tetapi juga dari daerah lain di NTT bahkan dari Jawa. Mereka rata-rata punya pendidikan lebih tinggi dan kemampuan yang memang dibutuhkan di dunia pariwisata. Sementara anak-anak lokal banyak yang hanya tamat SMP atau SMA sehingga sering kalah bersaing saat mencari pekerjaan.*
> (Wawancara dilakukan tanggal 17 Maret 2026)

Fenomena tersebut membuat sebagian masyarakat merasa belum menjadi pelaku utama dalam perkembangan pariwisata yang berlangsung di wilayah mereka sendiri. Meskipun Pulau Komodo merupakan tanah kelahiran mereka, banyak masyarakat lokal hanya memperoleh pekerjaan pada sektor informal atau pekerjaan dengan tingkat pendapatan yang relatif rendah. Sementara itu, peluang usaha yang lebih besar dan pekerjaan yang membutuhkan keterampilan khusus lebih banyak dimanfaatkan oleh pendatang yang memiliki modal, pendidikan, dan pengalaman yang lebih baik.

Nelayan tradisional Om Irus juga menyampaikan bahwa masyarakat lokal sering merasa tertinggal ketika harus bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah.

> *Kalau bersaing dengan orang dari Labuan Bajo saja sudah sulit, apalagi dengan orang dari luar NTT atau dari Jawa yang pendidikannya lebih tinggi. Mereka datang sudah punya pengalaman dan kemampuan yang dibutuhkan perusahaan wisata. Sedangkan masyarakat sini banyak yang belum sempat sekolah tinggi, jadi peluang kerja yang bagus sering diambil orang luar.*
> (Wawancara dilakukan tanggal 16 Maret 2026)

Hal serupa disampaikan oleh Om Arsit, seorang penjual buah yang sebelumnya bekerja sebagai nelayan. Menurutnya, masyarakat lokal sering kali hanya menjadi penonton di tengah perkembangan pariwisata yang berlangsung di Pulau Komodo.

> *Sekarang banyak usaha wisata yang dijalankan orang luar. Ada yang dari Labuan Bajo, dari Flores, bahkan dari Jawa. Mereka lebih siap karena punya modal dan pendidikan. Kami masyarakat lokal kadang hanya dapat bagian kecil saja karena kemampuan kami masih terbatas. Kalau tidak ada peningkatan pendidikan dan pelatihan, masyarakat Komodo akan terus kalah bersaing di daerah sendiri.*
>
> (Wawancara dilakukan tanggal 18 Maret 2026)

Temuan ini menunjukkan bahwa perkembangan pariwisata di Pulau Komodo belum sepenuhnya mampu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia lokal secara merata. Ketimpangan pendidikan dan keterampilan antara masyarakat Suku Komodo dengan pendatang dari luar daerah menyebabkan masyarakat lokal berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam persaingan ekonomi. Jika kondisi tersebut terus berlangsung, maka masyarakat lokal berpotensi semakin tertinggal dan hanya menjadi penerima dampak pembangunan, bukan sebagai pelaku utama yang memperoleh manfaat terbesar dari perkembangan pariwisata di Pulau Komodo. Oleh karena itu, peningkatan akses pendidikan, pelatihan keterampilan, penguasaan bahasa asing, serta pemberdayaan masyarakat lokal menjadi kebutuhan yang sangat penting agar masyarakat Suku Komodo mampu bersaing secara lebih adil dengan tenaga kerja dan pelaku usaha dari Labuan Bajo, wilayah lain di Nusa Tenggara Timur, maupun dari Pulau Jawa.

4.2 PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Pulau Komodo, ditemukan bahwa kebijakan pengelolaan kawasan konservasi dan pengembangan pariwisata memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat Suku Komodo. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan dalam bidang ekonomi, tetapi juga mempengaruhi kondisi sosial budaya, pendidikan, hingga hubungan masyarakat dengan pemerintah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori evaluasi kebijakan publik dari William N. Dunn yang terdiri dari indikator efektivitas (effectiveness), efisiensi (efficiency), kecukupan (adequacy), pemerataan (equity), responsivitas (responsiveness), dan ketepatan (appropriateness) untuk menganalisis sejauh mana kebijakan konservasi dan pengembangan pariwisata berjalan sesuai tujuan serta dampaknya terhadap masyarakat lokal.

Melalui indikator efektivitas, peneliti menganalisis apakah kebijakan mampu mencapai tujuan pelestarian kawasan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada indikator efisiensi, peneliti melihat perbandingan antara manfaat kebijakan dengan biaya dan pengorbanan yang harus ditanggung masyarakat, khususnya nelayan lokal. Selanjutnya indikator kecukupan digunakan untuk melihat sejauh mana kebijakan mampu menjawab kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat Suku Komodo. Pada indikator pemerataan, peneliti menganalisis apakah manfaat perkembangan pariwisata telah dirasakan secara adil oleh masyarakat lokal atau lebih banyak dinikmati oleh pihak luar. Sementara indikator responsivitas digunakan untuk melihat sejauh mana pemerintah merespons kebutuhan, keluhan, dan aspirasi masyarakat lokal. Kemudian indikator ketepatan digunakan untuk menilai kesesuaian kebijakan dengan kondisi sosial budaya masyarakat Suku Komodo sebagai masyarakat asli yang telah hidup secara turun-temurun di Pulau Komodo. penelitian ini juga menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dari John W. Creswell untuk memahami pengalaman hidup masyarakat secara langsung. Dalam pendekatan Creswell, penelitian kualitatif menekankan pentingnya memahami realitas sosial berdasarkan pengalaman, pandangan, perasaan, dan makna yang dirasakan langsung oleh masyarakat terhadap suatu fenomena. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berfokus pada data angka atau statistik, tetapi lebih menekankan pada pengalaman nyata masyarakat Suku Komodo dalam menghadapi perubahan sosial, ekonomi, dan budaya akibat kebijakan konservasi dan perkembangan pariwisata di Pulau Komodo.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada tahapan analisis data kualitatif menurut Creswell, yaitu mengorganisasi data, membaca keseluruhan data, melakukan proses (coding), mengelompokkan tema-tema penelitian, menginterpretasikan makna data, dan menyajikan hasil penelitian secara naratif. Pada tahap awal, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, peneliti membaca dan memahami seluruh hasil wawancara untuk menemukan pola-pola permasalahan yang dialami masyarakat. ketimpangan pariwisata, dan hubungan masyarakat dengan pemerintah. Dari proses tersebut kemudian ditemukan berbagai tema utama yang menjelaskan kondisi masyarakat Suku Komodo setelah berkembangnya kawasan konservasi dan pariwisata. interpretasi data dilakukan dengan memahami makna pengalaman hidup masyarakat berdasarkan sudut pandang informan secara langsung. Oleh karena itu, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan Kepala Desa Komodo, dua orang nelayan, seorang penjual buah yang sebelumnya bekerja sebagai nelayan, serta seorang (tour guide) lokal untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi masyarakat saat ini. Melalui wawancara tersebut, peneliti dapat memahami bagaimana masyarakat memaknai perubahan yang terjadi dalam kehidupan mereka, mulai dari perubahan pekerjaan, keterbatasan ruang hidup, sulitnya akses pendidikan, hingga kekhawatiran terhadap masa depan generasi Suku Komodo di tanah mereka sendiri.

Dengan menggunakan teori William Dunn dan teknik analisis kuaitatif dari Creswell, penelitian ini berupaya tidak hanya menjelaskan keberhasilan kebijakan konservasi dari sisi pelestarian lingkungan, tetapi juga menginterpretasikan berbagai dampak sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan yang dirasakan langsung oleh masyarakat Suku Komodo sebagai kelompok yang hidup di kawasan konservasi tersebut.

4.2.1. Efektivitas (*effectiveness*)

Dalam evaluasi kebijakan publik, efektivitas berfokus pada hasil atau dampak yang dihasilkan setelah kebijakan diterapkan. Suatu kebijakan dikatakan efektif apabila tujuan yang menjadi dasar pembentukannya dapat diwujudkan sesuai dengan target yang direncanakan. Penilaian efektivitas tidak hanya melihat apakah program telah dilaksanakan, tetapi juga menilai apakah pelaksanaan tersebut mampu menghasilkan perubahan yang diharapkan. Oleh karena itu, efektivitas berkaitan erat dengan keberhasilan kebijakan dalam menyelesaikan masalah publik yang menjadi alasan utama kebijakan tersebut dibuat. Semakin besar tingkat pencapaian tujuan, maka semakin tinggi pula tingkat efektivitas kebijakan.(T.W.W., 1982)

Dalam penelitian kebijakan publik, efektivitas sering digunakan untuk mengukur hubungan antara tujuan dan hasil yang dicapai. Analisis efektivitas membantu peneliti mengetahui apakah kebijakan benar-benar memberikan manfaat sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan. Dengan demikian, indikator ini menjadi dasar penting dalam menilai keberhasilan suatu kebijakan secara keseluruhan. Efektivitas kebijakan tersebut terlihat dari keberhasilan pemerintah dalam menjaga kawasan Taman Nasional Komodo agar tetap terlindungi dari berbagai aktivitas yang dapat merusak ekosistem, seperti eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, perusakan habitat satwa, maupun pembangunan yang tidak terkendali di kawasan konservasi. Pemerintah melalui sistem pengelolaan kawasan konservasi melakukan pembatasan terhadap aktivitas tertentu guna menjaga keseimbangan lingkungan serta mempertahankan kondisi alam Pulau Komodo agar tetap lestari. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kawasan konservasi tetap dapat menjalankan fungsi ekologisnya sebagai habitat utama komodo sekaligus kawasan pelestarian keanekaragaman hayati.kondisi lingkungan di Pulau Komodo masih tergolong cukup baik dan relatif terjaga dibandingkan wilayah lain yang mengalami tekanan pembangunan maupun eksploitasi lingkungan secara besar-besaran.

Kawasan savana, hutan, bukit-bukit alami, serta ekosistem laut di sekitar Pulau Komodo masih memperlihatkan kondisi yang cukup lestari dan tetap menjadi bagian penting dari sistem kehidupan satwa liar, termasuk komodo sebagai spesies endemik yang hanya ditemukan di wilayah tertentu di Indonesia. Keberadaan komodo yang tetap terjaga menunjukkan bahwa tujuan utama kebijakan konservasi, yaitu

melindungi habitat komodo dan menjaga kelangsungan hidup spesies tersebut, secara umum telah berjalan dengan cukup baik. Hasil penelitian lain juga menunjukkan bahwa keberadaan kawasan konservasi dan kebijakan perlindungan komodo telah membantu menjaga habitat alami komodo beserta satwa mangsanya. Pengawasan kawasan dan pembatasan aktivitas tertentu dinilai mampu mengurangi ancaman terhadap populasi komodo sehingga keberlangsungan spesies endemik ini tetap terjaga hingga saat ini. Kondisi tersebut menjadi indikator bahwa kebijakan konservasi memiliki dampak positif terhadap perlindungan ekosistem di Pulau Komodo (Tresa Rosari et al., 2025).

Perkembangan sektor wisata di Pulau Komodo mengalami peningkatan yang cukup besar dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah wisatawan yang datang terus meningkat dan aktivitas wisata di kawasan tersebut berkembang secara signifikan. Keberhasilan pemerintah menjadikan Pulau Komodo sebagai destinasi wisata internasional menunjukkan bahwa tujuan kebijakan dalam memperkenalkan kawasan konservasi sebagai objek wisata berbasis pelestarian lingkungan telah berjalan secara efektif. Perkembangan tersebut juga memberikan dampak pada tumbuhnya aktivitas ekonomi di sekitar kawasan wisata, seperti jasa pemandu wisata (tour guide), transportasi laut, usaha perdagangan kecil, penjualan makanan, penginapan, hingga penjualan suvenir khas Pulau Komodo

Hal ini di dukung oleh Pernyataan yang di sampaikan Oleh pak Haji Aksan selaku Kepala Desa Komodo,Berikut pernyataannya;

> *Sekarang Pulau Komodo lebih dikenal dunia dan wisatawan terus datang. Infrastruktur wisata juga semakin berkembang. (*Wawancara dilakukan tanggal 15 maret 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat juga melihat adanya perubahan besar terhadap pengelolaan kawasan konservasi di Pulau Komodo. Kawasan yang sebelumnya hanya dikenal secara terbatas kini berkembang menjadi destinasi wisata internasional yang memiliki perhatian besar terhadap perlindungan lingkungan dan keberadaan komodo. Hal tersebut memperlihatkan bahwa tujuan utama kebijakan konservasi dalam menjaga kawasan dan meningkatkan daya tarik wisata berbasis lingkungan telah tercapai secara cukup baik. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat juga melihat adanya perubahan besar terhadap pengelolaan kawasan konservasi di Pulau Komodo. Kawasan yang sebelumnya hanya dikenal secara terbatas kini berkembang menjadi destinasi wisata internasional yang memiliki perhatian besar terhadap perlindungan lingkungan dan keberadaan komodo. Hal tersebut memperlihatkan bahwa tujuan utama kebijakan konservasi dalam menjaga kawasan dan meningkatkan daya tarik wisata berbasis lingkungan telah tercapai secara cukup baik.

Efektivitas kebijakan juga terlihat dari keberhasilan menjaga populasi

komodo sebagai satwa endemik yang menjadi identitas utama Pulau Komodo. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, keberadaan komodo hingga saat ini masih tetap terjaga dan menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat lokal. Masyarakat Suku Komodo bahkan memiliki hubungan emosional dan historis dengan komodo karena sejak dahulu mereka hidup berdampingan dengan satwa tersebut. Oleh karena itu, perlindungan terhadap komodo dipandang penting bukan hanya dalam konteks konservasi lingkungan, tetapi juga dalam menjaga identitas budaya masyarakat lokal.

Hal ini di dukung oleh Pernyataan seorang tour guide lokal yang Benama kak Irsan, Berikut pernyataannya:

> *Kalau komodo tidak dijaga, wisatawan juga tidak akan datang lagi karena mereka datang ke sini memang untuk lihat komodo.Saking terkenalnya komodo ini, Sampe kita pernah kewahan untuk terima mereka, itu pun kami sudah dengan tour guide yang dari labuan bajo atau orang luar yang kerja di kapal pesiar*
> (Wawancara dilakukan tanggal 17 maret 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan menjaga komodo tidak hanya penting bagi keberlangsungan lingkungan, tetapi juga sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat di Pulau Komodo dan sekitarnya . Dengan tetap terjaganya populasi komodo, maka daya tarik wisata Pulau Komodo sebagai destinasi internasional juga tetap bertahan.

Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa efektivitas kebijakan belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat lokal, khususnya dalam aspek kesejahteraan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Suku Komodo. Meskipun kawasan wisata berkembang dan jumlah wisatawan meningkat, sebagian masyarakat masih merasa bahwa manfaat ekonomi dari perkembangan tersebut belum dirasakan secara maksimal oleh masyarakat lokal. Sebagian besar masyarakat masih menghadapi kesulitan ekonomi akibat pembatasan wilayah tangkap, sulitnya akses modal usaha, serta terbatasnya peluang pekerjaan di luar sektor nelayan dan pariwisata. Kondisi ini mengindikasikan adanya celah (*gap*) yang lebar antara pertumbuhan industri pariwisata modern dengan kesiapan serta aksesibilitas masyarakat adat. Pembatasan zonasi wilayah tangkap demi kepentingan konservasi, di satu sisi, berhasil menjaga ekosistem, namun di sisi lain secara drastis memotong urat nadi perekonomian tradisional Suku Komodo yang mayoritas berlatar belakang nelayan. Penelitian lain juga menyatakan Tanpa adanya program alih profesi yang terstruktur, pendampingan literasi keuangan, serta proteksi regulasi yang memprioritaskan keterlibatan UMKM lokal di destinasi premium tersebut, masyarakat asli justru berisiko menjadi penonton di tanah mereka sendiri. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan

konservasi ke depan tidak boleh hanya diukur dari angka kunjungan turis atau kelestarian satwa, melainkan harus mengintegrasikan indikator kedaulatan ekonomi masyarakat tempatan sebagai pilar utamanya.(Purnama & Ibrahim, 2024)

Hal ini di dukung oleh pernyataan Om irus Selaku Nelayan Tradisional di Pulau Komodo,Berikut Penjelasan nya:

> *Wisata memang ramai bahkan ful dermaga penerimaan tamu, tapi kehidupan kami begini-begini saja, Kadang juga kapal pesiar yang buat rusak karang dengan jangkarnya tapi kami Nelayan yang dapat teguran,tapi kami terima-terima saja kami tidak marah dengan siapa-siapa, karena keluarga kami yang lain juga pasti dapat rejeki dari kapal-kapal itu.tapi kami masih dengan pekerjaan yang belum tentu hasilnya, kalau kami pergi cari ikan juga kami harus pergi jauh dan itu membutuhkan banyak modal dan resiko yang tinggi*"(Wawancara dilakukan tanggal 16 Maret 2026)

Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa dampak kebijakan konservasi turut dirasakan oleh masyarakat kecil yang menggantungkan hidup pada usaha perdagangan sederhana. Seorang penjual buah yang sebelumnya bekerja sebagai nelayan menjelaskan bahwa sejak adanya pembatasan kawasan konservasi, masyarakat tidak lagi bebas mengambil hasil alam dari kawasan hutan di Pulau Komodo untuk dijadikan bahan jualan maupun kebutuhan sehari-hari. Akibatnya, masyarakat harus membeli kebutuhan dagangan dari luar pulau seperti Labuan Bajo dengan biaya yang jauh lebih mahal karena harus menanggung biaya transportasi laut dan distribusi barang.

Hal ini juga di dukung oleh pernyataan Om Arsit selaku petani buah,berikut pernyataannya:

> *Sekarang susah cari bahan jualan di pulau sendiri karena tidak bisa ambil dari hutan lagi. Jadi kami harus beli buah dari Labuan Bajo dan modal jadi lebih besar karena biaya transportasi juga mahal. Kadang keuntungan sedikit, tapi usaha ini tetap saya jalani untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.*(wawancara dilakukan tanggal 18 maret 2026)

Kondisi tersebut menyebabkan keuntungan masyarakat menjadi semakin kecil karena harga modal dagangan meningkat sementara daya beli masyarakat lokal masih terbatas. Selain harus menghadapi tingginya biaya kebutuhan usaha, masyarakat juga mengalami kesulitan memperoleh akses modal untuk membangun atau mengembangkan usaha baru. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar masyarakat tidak memiliki sertifikat tanah pribadi yang dapat dijadikan jaminan ketika ingin mengajukan pinjaman ke bank. Hal tersebut terjadi karena sebagian

besar wilayah Pulau Komodo berada dalam pengelolaan kawasan konservasi pemerintah pusat sehingga masyarakat tidak memiliki kepemilikan tanah secara resmi.Akibatnya, masyarakat kecil seperti pedagang, nelayan, maupun pelaku usaha lokal sangat sulit memperoleh pinjaman modal dalam jumlah besar untuk mengembangkan usaha mereka. Beberapa masyarakat sebenarnya memiliki keinginan untuk membuka usaha baru seperti kios, penginapan kecil, usaha makanan, maupun usaha wisata lainnya, namun keterbatasan akses modal membuat keinginan tersebut sulit diwujudkan. Kondisi ini menyebabkan masyarakat lokal kalah bersaing dengan pelaku usaha dari luar daerah yang memiliki modal lebih besar dan akses usaha yang lebih mudah.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan konservasi tidak hanya berdampak pada keterbatasan akses masyarakat terhadap sumber daya alam, tetapi juga mempengaruhi kemampuan ekonomi masyarakat dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. efektivitas kebijakan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat lokal juga dinilai belum berjalan secara maksimal. Infrastruktur pendidikan di Desa Komodo masih sangat terbatas karena hanya tersedia fasilitas pendidikan sampai tingkat SD dan SMP. Untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA maupun perguruan tinggi, masyarakat harus keluar dari Pulau Komodo dengan biaya yang cukup besar. Kondisi tersebut menyebabkan banyak anak muda akhirnya putus sekolah dan sulit bersaing dalam dunia kerja, khususnya di sektor pariwisata yang membutuhkan keterampilan tertentu seperti kemampuan bahasa asing dan pelayanan wisata.

Hal ini di perkuat oleh pernyataan dari Irsan Selaku tour guide lokal:

> *Banyak anak muda di sini sebenarnya mau maju di pariwisata, tapi mereka kalah pendidikan dan skill dengan orang luar. Anak-anak muda lokal punya semangat untuk bekerja dan berkembang di wisata karena mereka sadar pariwisata sekarang jadi sumber penghasilan penting di Pulau Komodo. Tapi masalahnya kesempatan belajar mereka terbatas. Di sini sekolah hanya sampai SMP dan untuk lanjut harus keluar pulau dengan biaya yang tidak semua keluarga mampu. Selain itu pelatihan bahasa asing dan keterampilan wisata juga masih sangat kurang. Akibatnya ketika ada pekerjaan bagus di sektor pariwisata, banyak perusahaan atau usaha wisata lebih memilih orang luar yang pendidikannya lebih tinggi dan pengalamannya lebih baik.*(Wawancara dilakukan tanggal 17 Maret 2026)

dapat disimpulkan bahwa kebijakan konservasi dan pengembangan pariwisata di Pulau Komodo cukup berhasil dalam mencapai tujuan pelestarian lingkungan, menjaga habitat komodo, dan mempertahankan kawasan sebagai destinasi wisata internasional. Akan tetapi, efektivitas kebijakan tersebut belum sepenuhnya tercapai dalam aspek peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal

karena masih terdapat berbagai persoalan ekonomi, pendidikan, dan keterbatasan akses masyarakat terhadap manfaat pembangunan pariwisata.

4.2.2 Efesiensi (*efficiency*)

Efisiensi merupakan indikator yang digunakan untuk menilai perbandingan antara hasil yang diperoleh dengan sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan. Sumber daya tersebut dapat berupa anggaran, waktu, tenaga kerja, fasilitas, maupun berbagai bentuk dukungan lainnya yang diperlukan selama proses implementasi kebijakan. Suatu kebijakan dikatakan efisien apabila tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya yang optimal. Artinya, hasil yang diperoleh sebanding atau bahkan lebih besar dibandingkan biaya dan usaha yang dikeluarkan. Sebaliknya, apabila pelaksanaan kebijakan membutuhkan biaya yang sangat besar namun hasilnya tidak maksimal, maka kebijakan tersebut dinilai kurang efisien.(Hendiyani & Fansuri, 2024)

Sebelum adanya pembatasan kawasan konservasi, masyarakat nelayan di Desa Komodo umumnya menangkap ikan di wilayah perairan yang relatif dekat dengan kampung mereka. Nelayan tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk mencapai lokasi penangkapan ikan karena sumber daya laut masih dapat dijangkau di sekitar kawasan Pulau Komodo. Kondisi tersebut membuat biaya operasional nelayan masih tergolong rendah karena penggunaan bahan bakar tidak terlalu banyak dan masyarakat masih dapat menggunakan perahu kecil maupun mesin sederhana untuk melaut. Selain itu, risiko keselamatan nelayan juga relatif lebih kecil karena mereka tidak perlu pergi terlalu jauh ke tengah laut.

Namun setelah beberapa wilayah perairan ditetapkan sebagai kawasan konservasi dan aktivitas penangkapan ikan dibatasi, masyarakat harus mencari ikan hingga ke wilayah laut lepas yang jaraknya jauh dari kampung mereka. Perubahan tersebut menyebabkan nelayan harus menghabiskan waktu lebih lama di laut dan membutuhkan biaya operasional yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara, biaya terbesar yang dirasakan nelayan adalah kebutuhan bahan bakar minyak untuk kapal. Karena lokasi penangkapan ikan semakin jauh, penggunaan bensin maupun solar menjadi jauh lebih banyak sehingga pengeluaran masyarakat meningkat secara signifikan. Sebagian nelayan beranggapan bahwa penetapan kawasan konservasi laut akan berdampak terhadap menurunnya pendapatan mereka karena tertutupnya sebagian fishing ground mereka(Fatimah, 2021)

Kebijakan konservasi menyebabkan meningkatnya risiko keselamatan masyarakat nelayan. Berdasarkan hasil observasi lapangan, kondisi laut di wilayah luar Pulau Komodo dikenal memiliki arus yang kuat dan ombak yang besar, terutama pada musim angin tertentu. Nelayan menyampaikan bahwa mereka sering menghadapi perubahan cuaca yang tidak menentu ketika berada di tengah laut.

Angin kencang dan gelombang tinggi menjadi ancaman serius bagi keselamatan nelayan tradisional yang sebagian besar masih menggunakan peralatan sederhana. Beberapa nelayan mengaku pernah mengalami kondisi kapal hampir tenggelam akibat dihantam ombak besar ketika sedang mencari ikan di laut lepas. Kondisi tersebut membuat masyarakat merasa pekerjaan sebagai nelayan saat ini jauh lebih berbahaya dibandingkan sebelumnya. Risiko keselamatan yang tinggi juga menimbulkan rasa cemas bagi keluarga nelayan yang menunggu di rumah karena masyarakat sadar bahwa perjalanan melaut sekarang memiliki kemungkinan bahaya yang lebih besar. kondisi laut lepas yang memiliki ombak besar menyebabkan masyarakat tidak dapat lagi menggunakan perahu kecil seperti yang biasa dipakai sebelumnya. Untuk dapat mencapai wilayah penangkapan ikan yang lebih jauh, masyarakat membutuhkan armada kapal yang lebih besar dan mesin yang lebih kuat agar mampu menghadapi arus laut dan gelombang tinggi. Akan tetapi, sebagian besar nelayan di Desa Komodo merupakan nelayan tradisional dengan kondisi ekonomi yang terbatas sehingga mereka tidak memiliki kemampuan untuk membeli kapal besar maupun mesin berkekuatan tinggi.

Kondisi inilah yang menyebabkan sebagian masyarakat mulai meninggalkan pekerjaan sebagai nelayan karena merasa penghasilan yang diperoleh tidak lagi sebanding dengan biaya dan risiko yang harus dihadapi setiap hari. Salah satu informan penelitian, yaitu seorang penjual buah yang sebelumnya bekerja sebagai nelayan, mengaku memutuskan berhenti melaut karena merasa pekerjaan tersebut sudah terlalu berat secara ekonomi maupun keselamatan.

Hal ini di perkuat oleh pernyataan Om Arsit selaku petani buah yang dulunya adalah nelayan :

> *Saya berhenti melaut karena biaya terlalu besar dan risikonya tinggi. Sekarang saya jual buah walaupun penghasilannya kecil. Dulu kalau melaut tidak perlu pergi terlalu jauh dan biaya bensin juga tidak sebanyak sekarang. Tapi sekarang harus ke laut lepas, ombak besar, cuaca juga sering tidak menentu. Kadang hasil ikan yang didapat tidak cukup untuk tutup biaya bensin dan kebutuhan melaut lainnya. Saya juga takut karena pekerjaan nelayan sekarang lebih berbahaya. Akhirnya saya memilih berhenti dan mencoba jual buah untuk tetap memenuhi kebutuhan keluarga, walaupun penghasilannya tidak sebesar dulu.*(Wawancara dilakukan tanggal 18 Maret 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat mulai mencari pekerjaan alternatif meskipun penghasilannya tidak terlalu besar, karena pekerjaan sebagai nelayan dianggap semakin sulit dipertahankan dalam kondisi saat ini. Namun di sisi lain, pilihan pekerjaan masyarakat juga sangat terbatas karena mereka tidak lagi bebas membuka lahan pertanian maupun peternakan akibat kawasan konservasi.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pekerjaan baru yang dijalankan masyarakat ternyata masih menghadapi berbagai kesulitan ekonomi. Penjual buah tersebut menjelaskan bahwa setelah berhenti menjadi nelayan, ia mencoba bertahan hidup dengan berjualan buah kepada masyarakat dan wisatawan. Akan tetapi, usaha tersebut juga tidak berjalan mudah karena masyarakat tidak lagi bebas mengambil hasil buah-buahan atau tanaman dari kawasan hutan di Pulau Komodo akibat aturan konservasi yang semakin ketat. Kondisi tersebut membuat pedagang kecil harus mendatangkan buah dari luar pulau seperti Labuan Bajo dan beberapa daerah lain di sekitar Manggarai Barat.

Om Arsit Kembali menyatakan :

> *Kalau jual buah sekarang harus beli dari Labuan Bajo karena di sini sudah susah ambil dari hutan, makanya jangan heran kalau di sini buah mahal-mahal. Semua barang harus didatangkan dari luar pulau dan biaya transportasi laut juga tidak murah. Dulu masyarakat masih bisa ambil beberapa hasil alam untuk dijual atau dikonsumsi sendiri, tapi sekarang sudah banyak pembatasan karena kawasan konservasi. Jadi kami harus keluar modal lebih besar untuk beli barang dagangan, sementara keuntungan yang didapat kadang tidak seberapa karena pembeli juga mengeluh harga terlalu mahal.*
> (Wawancara dilakukan tanggal 18 Maret 2026)

Kondisi tersebut menyebabkan biaya usaha masyarakat menjadi semakin tinggi karena mereka harus mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi laut dan pembelian barang dagangan dari luar pulau. Selain harga barang yang lebih mahal, masyarakat juga harus menyesuaikan dengan kondisi cuaca dan transportasi laut yang tidak selalu lancar. Dalam beberapa kondisi, pasokan buah dari luar pulau terlambat datang sehingga masyarakat kesulitan menjalankan usaha dagang mereka secara stabil. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat kecil di Pulau Komodo tidak hanya mengalami kesulitan dalam sektor perikanan, tetapi juga menghadapi hambatan ekonomi ketika mencoba beralih ke pekerjaan lain. Keterbatasan akses terhadap sumber daya alam dan tingginya biaya usaha membuat masyarakat tetap berada dalam kondisi ekonomi yang rentan meskipun telah mencoba mencari alternatif mata pencaharian di luar sektor nelayan.

Temuan lain menunjukkan bahwa keterbatasan akses modal yang dialami masyarakat lokal tidak hanya disebabkan oleh rendahnya kondisi ekonomi masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan status kawasan konservasi yang membatasi kepemilikan lahan secara formal. Ketidakmampuan masyarakat memperoleh sertifikat tanah menyebabkan masyarakat kehilangan salah satu syarat utama dalam mengakses pinjaman perbankan. Akibatnya, masyarakat lokal hanya mampu mengembangkan usaha dalam skala kecil dan sulit bersaing dengan

investor dari luar daerah yang memiliki modal besar serta legalitas usaha yang lebih kuat.(Purnama & Ibrahim, 2024) Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan pariwisata di Pulau Komodo belum sepenuhnya menciptakan keadilan ekonomi bagi masyarakat lokal. Meskipun kawasan wisata mengalami perkembangan yang cukup pesat, sebagian besar masyarakat lokal masih berada pada posisi ekonomi yang lemah karena keterbatasan modal, rendahnya akses terhadap lembaga keuangan, serta minimnya dukungan pemberdayaan usaha dari pemerintah. Situasi ini menyebabkan manfaat ekonomi pariwisata lebih banyak dinikmati oleh pelaku usaha dari luar daerah dibandingkan masyarakat asli Pulau Komodo sendiri.

4.2.3 Kecukupan(*adequacy*)

Indikator ini tidak hanya melihat keberhasilan pencapaian tujuan, tetapi juga menilai apakah hasil yang dicapai sudah cukup untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Sebuah kebijakan dapat dikatakan efektif karena berhasil mencapai target tertentu, namun belum tentu cukup dalam menyelesaikan masalah secara menyeluruh. Oleh karena itu, kecukupan berfokus pada tingkat pemenuhan kebutuhan dan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat. Semakin besar kontribusi kebijakan dalam mengatasi masalah, maka semakin tinggi tingkat kecukupannya. Dalam penelitian kebijakan publik, indikator kecukupan membantu peneliti memahami apakah hasil yang dicapai benar-benar memberikan solusi yang memadai terhadap persoalan yang dihadapi. Analisis ini penting untuk mengetahui apakah masih terdapat kebutuhan, kendala, atau masalah yang belum teratasi meskipun kebijakan telah dijalankan. Ditemukan bahwa kebijakan konservasi dan pengembangan pariwisata di Pulau Komodo belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat Suku Komodo, khususnya dalam aspek akses modal usaha, ketersediaan lapangan pekerjaan, dan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat lokal.(T.W.W., 1982)

Salah satu persoalan utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah sulitnya masyarakat memperoleh akses pinjaman modal usaha untuk meningkatkan kondisi ekonomi keluarga mereka. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, sebagian besar masyarakat di Desa Komodo tidak memiliki sertifikat tanah pribadi yang dapat dijadikan jaminan ketika ingin mengajukan pinjaman modal ke bank maupun lembaga keuangan lainnya. Kondisi tersebut terjadi karena sebagian besar wilayah Pulau Komodo saat ini berada dalam pengelolaan pemerintah pusat melalui kawasan konservasi Taman Nasional Komodo. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki hak kepemilikan tanah secara penuh meskipun mereka telah tinggal secara turun-temurun di kawasan tersebut sejak zaman nenek moyang mereka.

Banyak masyarakat yang memiliki keinginan untuk meningkatkan kondisi

ekonomi mereka. Beberapa masyarakat ingin membeli kapal nelayan yang lebih besar agar dapat melaut lebih aman di laut lepas, memperbaiki mesin kapal yang sudah rusak, membuka usaha wisata kecil, membangun kios dagang, memperbesar usaha penjualan makanan, hingga membangun penginapan sederhana bagi wisatawan. Akan tetapi, keterbatasan modal dan sulitnya memperoleh pinjaman menyebabkan keinginan tersebut sulit diwujudkan. Kondisi ini membuat masyarakat lokal mengalami kesulitan untuk berkembang secara ekonomi dan kalah bersaing dengan pelaku usaha dari luar daerah yang memiliki modal lebih besar dan akses usaha yang lebih mudah. Dalam sektor pariwisata misalnya, sebagian besar usaha besar seperti penginapan, kapal wisata, maupun jasa wisata modern lebih banyak dimiliki oleh pihak luar karena masyarakat lokal tidak memiliki kemampuan modal yang memadai untuk membangun usaha serupa.

Selain persoalan akses modal, penelitian ini juga menemukan bahwa masyarakat mengalami keterbatasan dalam pilihan mata pencaharian sejak diberlakukannya pengelolaan kawasan konservasi secara lebih ketat. Sebelum kawasan konservasi berkembang seperti saat ini, sebagian masyarakat masih dapat melakukan aktivitas bertani dan beternak secara sederhana untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka. Masyarakat memanfaatkan lahan di sekitar kawasan untuk menanam tanaman pangan maupun memelihara ternak dalam skala kecil sebagai sumber tambahan penghasilan dan kebutuhan sehari-hari. Namun setelah kawasan konservasi diberlakukan secara lebih ketat, masyarakat tidak lagi bebas membuka lahan pertanian maupun peternakan karena adanya pembatasan penggunaan kawasan. Aktivitas masyarakat terhadap kawasan hutan dan lahan tertentu menjadi semakin terbatas demi menjaga kelestarian lingkungan konservasi. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat kehilangan banyak pilihan pekerjaan yang sebelumnya masih dapat mereka lakukan.

Hal ini di perkuat Oleh bapak Bakri selaku Nelayan Tradisional :

> *Sekarang kami cuma bisa berharap dari laut atau wisata, kerja lain sudah susah. Dulu masyarakat masih bisa berkebun atau beternak kecil-kecilan untuk tambah penghasilan keluarga, tapi sekarang sudah tidak bebas lagi karena banyak kawasan yang dibatasi. Akibatnya pilihan pekerjaan masyarakat jadi sangat sedikit. Kalau hasil laut menurun atau wisata sepi, masyarakat langsung kesulitan ekonomi karena tidak ada pekerjaan lain yang bisa diandalkan. Kami jadi sangat bergantung pada laut dan pariwisata untuk bertahan hidup sehari-hari.*
> (Wawancara dilakukan tanggal 16 Maret 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat saat ini hanya bergantung pada dua sektor utama, yaitu sektor nelayan dan sektor pariwisata. Ketergantungan tersebut membuat kondisi ekonomi masyarakat menjadi sangat rentan karena apabila salah satu sektor mengalami masalah, maka kehidupan

ekonomi masyarakat langsung terdampak secara signifikan. Dalam sektor perikanan, masyarakat menghadapi berbagai kesulitan seperti pembatasan wilayah tangkap, tingginya biaya operasional melaut, meningkatnya risiko keselamatan di laut lepas, serta hasil tangkapan ikan yang tidak menentu. Sementara dalam sektor pariwisata, tidak semua masyarakat mampu terlibat secara maksimal karena keterbatasan pendidikan, keterampilan, kemampuan bahasa asing, dan modal usaha yang mereka miliki.

Penelitian ini juga menemukan bahwa sebagian masyarakat yang mencoba beralih pekerjaan ke sektor perdagangan kecil tetap menghadapi kesulitan ekonomi. Seorang penjual buah yang sebelumnya bekerja sebagai nelayan menjelaskan bahwa setelah berhenti melaut, ia mencoba mencari penghasilan dengan berjualan buah kepada masyarakat dan wisatawan. Namun usaha tersebut juga tidak berjalan mudah karena masyarakat tidak lagi bebas mengambil hasil alam dari kawasan hutan di Pulau Komodo akibat aturan konservasi. Akibatnya, ia harus membeli buah dari luar pulau seperti Labuan Bajo dengan biaya yang lebih mahal.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa bahkan pekerjaan alternatif yang dijalankan masyarakat pun tetap menghadapi berbagai hambatan ekonomi akibat keterbatasan akses terhadap sumber daya alam dan minimnya dukungan modal usaha. Masyarakat harus mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi dan distribusi barang dari luar pulau sehingga keuntungan usaha menjadi semakin kecil. Selain itu, ketergantungan terhadap sektor nelayan dan pariwisata juga menyebabkan masyarakat berada dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil. Ketika hasil tangkapan ikan menurun akibat cuaca buruk atau ketika jumlah wisatawan berkurang, masyarakat tidak memiliki pekerjaan alternatif lain yang dapat dijadikan sumber pendapatan tambahan. Akibatnya, kondisi ekonomi masyarakat menjadi sangat bergantung pada situasi laut dan perkembangan wisata di Pulau Komodo.

4.2.4 Pemerataan (*Equity*)

Pemerataan merupakan indikator yang digunakan untuk menilai bagaimana manfaat, biaya, maupun dampak dari suatu kebijakan didistribusikan kepada kelompok masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan. Indikator ini menekankan pada aspek keadilan dan kesetaraan dalam pelaksanaan kebijakan publik. Suatu kebijakan dinilai memiliki tingkat pemerataan yang baik apabila manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan oleh seluruh kelompok masyarakat secara proporsional tanpa adanya diskriminasi atau ketimpangan yang signifikan. Pemerataan juga memperhatikan apakah kelompok yang rentan atau kurang beruntung memperoleh akses yang sama terhadap manfaat kebijakan yang diberikan pemerintah. Pemerataan menjadi penting karena keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari besarnya manfaat yang dihasilkan, tetapi juga dari siapa yang menerima manfaat

tersebut. Dengan demikian, evaluasi pemerataan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat keadilan sosial yang tercipta melalui pelaksanaan suatu kebijakan.(Hukum et al., 2026)

Perkembangan sektor pariwisata di Pulau Komodo memang membawa perubahan besar terhadap kondisi ekonomi kawasan. Jumlah wisatawan yang terus meningkat setiap tahun menyebabkan aktivitas ekonomi di sekitar kawasan wisata berkembang dengan cukup pesat. Berbagai usaha seperti hotel, penginapan, restoran, kapal wisata, jasa perjalanan wisata, penjualan suvenir, hingga usaha perdagangan lainnya tumbuh seiring meningkatnya kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Perkembangan tersebut menjadikan Pulau Komodo sebagai salah satu destinasi wisata internasional yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Namun berdasarkan hasil penelitian, manfaat ekonomi dari perkembangan pariwisata tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat lokal. Sebagian besar usaha wisata dalam skala besar seperti hotel, kapal wisata modern, restoran, serta usaha perjalanan wisata lebih banyak dimiliki oleh pihak luar daerah yang memiliki modal besar, pendidikan lebih tinggi, pengalaman usaha yang lebih baik, dan jaringan bisnis yang lebih luas. Sementara masyarakat lokal di Desa Komodo sebagian besar hanya terlibat pada sektor pekerjaan kecil dengan penghasilan yang terbatas.

Hal ini di perkuat dengan pernyataan Oleh Irsan selaku tour guide lokal:

> *Yang punya usaha besar kebanyakan orang luar karena mereka punya modal dan pendidikan lebih baik. Kami orang lokal hanya jadi seperti ini saja, kalau tidak jadi nelayan ya paling kerja kecil-kecilan di wisata. Banyak masyarakat sebenarnya ingin punya usaha sendiri seperti penginapan, kapal wisata, atau restoran, tapi modal kami tidak cukup dan kemampuan juga masih terbatas. Orang luar lebih mudah berkembang karena mereka punya uang, pengalaman, dan pendidikan yang lebih tinggi. Sementara masyarakat lokal sering hanya jadi pekerja biasa atau bahkan hanya melihat perkembangan wisata tanpa bisa ikut menikmati keuntungan besarnya.*
> (Wawancara 17 Maret 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat lokal merasa belum menjadi pelaku utama dalam perkembangan ekonomi pariwisata di Pulau Komodo. Masyarakat hanya memperoleh bagian kecil dari perkembangan wisata yang terjadi di wilayah mereka sendiri, sedangkan keuntungan yang lebih besar banyak dinikmati oleh pihak luar yang datang dengan kemampuan modal dan pendidikan yang lebih tinggi. Penelitian ini menemukan bahwa keterbatasan modal menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan masyarakat lokal sulit berkembang dalam sektor pariwisata. Sebagian besar masyarakat tidak memiliki akses modal usaha yang memadai untuk membangun penginapan, membeli kapal wisata,

membuka restoran, maupun mengembangkan usaha wisata lainnya. Kondisi tersebut berkaitan dengan status kepemilikan tanah masyarakat yang sebagian besar berada dalam kawasan konservasi Taman Nasional Komodo sehingga banyak masyarakat tidak memiliki sertifikat tanah resmi yang dapat dijadikan jaminan ketika ingin mengajukan pinjaman modal ke bank.

Akibat keterbatasan tersebut, masyarakat lokal mengalami kesulitan bersaing dengan investor maupun pelaku usaha dari luar daerah yang memiliki kemampuan finansial lebih besar(Fatimah, 2021). Kondisi ini menyebabkan sebagian besar usaha wisata yang berkembang di Pulau Komodo justru dikuasai oleh pihak luar, sementara masyarakat lokal hanya menjadi pekerja atau penonton di daerah mereka sendiri. Selain persoalan modal, masyarakat lokal juga mengalami kesulitan bersaing dalam dunia kerja pariwisata karena rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya keterampilan yang mereka miliki. Berdasarkan hasil penelitian, fasilitas pendidikan di Desa Komodo masih sangat terbatas karena hanya tersedia pendidikan sampai tingkat SD dan SMP. Untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA maupun perguruan tinggi, masyarakat harus keluar dari Pulau Komodo dengan biaya yang cukup besar. Kondisi tersebut menyebabkan banyak anak muda akhirnya putus sekolah karena keterbatasan ekonomi keluarga.

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat berdampak langsung terhadap kemampuan mereka dalam memasuki dunia kerja pariwisata modern. Dalam sektor pariwisata, banyak pekerjaan membutuhkan kemampuan bahasa asing, pelayanan wisata, komunikasi yang baik, hingga kemampuan menggunakan teknologi. Namun pada kenyataannya, sebagian besar masyarakat lokal belum memiliki kemampuan tersebut karena minimnya akses pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai. Akibat kondisi tersebut, banyak posisi kerja yang lebih baik di sektor wisata justru diisi oleh tenaga kerja dari luar daerah yang memiliki pendidikan dan keterampilan lebih tinggi. Sementara masyarakat lokal umumnya hanya bekerja sebagai buruh kapal, pekerja kasar, penjual kecil, atau pekerjaan informal lainnya dengan penghasilan yang lebih rendah.

Hal ini di perkuat oleh pernyataan dari om Arsit Selaku petani buah:

> *Anak-anak muda di sini banyak yang kalah saing sama orang luar karena sekolah dan skill mereka lebih bagus. Banyak pemuda di Komodo sebenarnya mau bekerja di sektor wisata, tapi kemampuan mereka masih terbatas karena pendidikan di sini susah dan pelatihan juga jarang ada. Orang luar biasanya sudah punya pengalaman, bisa bahasa asing, dan lebih paham cara kerja pariwisata, jadi mereka lebih mudah diterima kerja. Sementara anak-anak muda lokal kebanyakan hanya dapat pekerjaan kecil atau bahkan tidak ikut terlibat sama sekali dalam usaha wisata*

yang berkembang di pulau ini
.(Wawancara dilakukan tanggal 18 Maret 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya ketimpangan kemampuan antara masyarakat lokal dengan pendatang dari luar daerah. Masyarakat Suku Komodo merasa bahwa mereka belum memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dalam sektor wisata meskipun pariwisata berkembang di wilayah tempat tinggal mereka sendiri. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa ketimpangan manfaat ekonomi tersebut secara perlahan menimbulkan perasaan ketidakadilan di tengah masyarakat lokal. Sebagian masyarakat merasa bahwa mereka hanya menjadi penonton di tanah mereka sendiri karena keuntungan terbesar dari perkembangan wisata lebih banyak dinikmati oleh pihak luar. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa masyarakat lokal akan semakin tertinggal apabila tidak ada perhatian khusus terhadap peningkatan pendidikan, keterampilan, dan akses modal bagi masyarakat Suku Komodo.

Om Arsit juga menyatakan :

> *Wisata memang ramai, tapi kami masyarakat kecil susah ikut berkembang karena modal dan pendidikan kurang. Banyak usaha besar di sini dimiliki orang luar karena mereka punya uang, pengalaman, dan pendidikan yang lebih baik. Sementara kami kalau mau buka usaha sendiri sangat susah karena tidak punya modal dan akses pinjaman juga sulit. Pendidikan kami juga terbatas, jadi kadang kami kalah saing dalam pekerjaan wisata. Akhirnya masyarakat kecil seperti kami hanya bisa usaha kecil-kecilan untuk bertahan hidup, sementara keuntungan besar lebih banyak dinikmati pihak luar.(*Wawancara dilakukan tanggal 18 Maret 2026)

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat kecil merasakan adanya kesenjangan dalam menikmati hasil perkembangan pariwisata. Walaupun kawasan Pulau Komodo berkembang menjadi destinasi wisata internasional yang terkenal, masyarakat lokal belum memperoleh manfaat ekonomi yang setara dibandingkan pihak luar yang memiliki kemampuan usaha lebih baik.

4.2. 5 Respontivitas (*responsiveness*)

Responsivitas merupakan indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan mampu merespons kebutuhan, aspirasi, harapan, dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Indikator ini menekankan pada kemampuan pemerintah dalam memahami dan menindaklanjuti tuntutan publik melalui kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan.Kebijakan yang responsif biasanya disusun dengan mempertimbangkan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat serta

melibatkan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan. Responsivitas juga dapat dilihat dari kemampuan pemerintah dalam menyesuaikan kebijakan terhadap perubahan situasi, kebutuhan masyarakat, maupun tantangan yang muncul selama implementasi berlangsung. Dalam penelitian kebijakan publik, responsivitas digunakan untuk menilai apakah kebijakan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat atau hanya berorientasi pada kepentingan institusi tertentu.(Hendiyani & Fansuri, 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan di Pulau Komodo, ditemukan bahwa responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat lokal dinilai belum berjalan secara maksimal. Masyarakat mengaku hingga saat ini masih minim mendapatkan dukungan pendidikan, pelatihan keterampilan, serta pendampingan yang memadai agar mampu beradaptasi dengan perkembangan pariwisata yang semakin modern. Padahal perkembangan wisata di Pulau Komodo menuntut masyarakat memiliki kemampuan tertentu seperti keterampilan pelayanan wisata, komunikasi dengan wisatawan, pengelolaan usaha wisata, hingga kemampuan bahasa asing untuk melayani wisatawan mancanegara.

Namun pada kenyataannya, sebagian besar masyarakat lokal belum memiliki kemampuan tersebut karena terbatasnya akses pendidikan dan minimnya pelatihan yang diberikan kepada masyarakat. Beberapa masyarakat menyampaikan bahwa pelatihan yang pernah dilakukan pemerintah hanya bersifat sementara dan belum benar-benar menyentuh kebutuhan utama masyarakat lokal. Temuan penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa masyarakat lokal di kawasan pariwisata dan konservasi sering kali belum memiliki kapasitas sumber daya manusia yang memadai untuk beradaptasi dengan perkembangan sektor wisata modern. Keterbatasan pendidikan, keterampilan, serta minimnya pelatihan menyebabkan masyarakat lokal sulit bersaing dalam memperoleh peluang ekonomi dari sektor pariwisata(Purnama & Ibrahim, 2024)

Hal ini diperkuat oleh pernyataan kak Irsan selaku tour guide lokal

> *Masyarakat sini jarang dapat pelatihan bahasa asing atau pelatihan wisata yang benar-benar membantu. Kalaupun ada pelatihan biasanya hanya sebentar dan tidak semua masyarakat bisa ikut. Padahal sekarang wisata di Komodo sudah berkembang besar dan banyak wisatawan asing datang setiap hari.*
> (Wawancara di lakukan tanggal 17 Maret 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat merasa belum memperoleh perhatian yang cukup dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal. Padahal kemampuan bahasa asing dan keterampilan wisata merupakan kebutuhan penting agar masyarakat dapat bersaing dengan tenaga kerja

dari luar daerah yang memiliki pendidikan dan kemampuan lebih baik. Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa pelatihan yang diberikan belum dilakukan secara berkelanjutan dan belum mampu menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan. Sebagian masyarakat bahkan mengaku belum pernah mengikuti pelatihan pariwisata sama sekali meskipun Pulau Komodo telah berkembang menjadi destinasi wisata internasional.

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Bakri selaku nelayan tradisional:

> *Kalau ada pelatihan yang serius mungkin anak-anak muda di sini bisa lebih maju dan tidak kalah sama orang luar. Banyak anak muda sebenarnya mau belajar dan ikut berkembang di pariwisata, tapi kesempatan mereka sangat terbatas.* (Wawancara 16 Maret 2026).

Selain persoalan pendidikan dan pelatihan, penelitian ini juga menemukan adanya persoalan serius terkait hubungan masyarakat dengan pemerintah, yaitu munculnya rasa takut masyarakat dalam menyampaikan pendapat secara terbuka mengenai kebijakan pemerintah dan kondisi sosial ekonomi yang mereka alami. Pada awal proses penelitian, peneliti mengalami kesulitan memperoleh informasi secara terbuka karena sebagian masyarakat terlihat enggan diwawancarai dan cenderung berhati-hati ketika pembahasan mulai berkaitan dengan bantuan sosial, kebijakan pemerintah, maupun dampak perkembangan pariwisata terhadap masyarakat lokal. Bahkan beberapa warga menolak diwawancarai secara langsung karena khawatir pendapat mereka diketahui pihak tertentu.

Setelah dilakukan pendekatan lebih lanjut, peneliti memperoleh informasi bahwa rasa takut tersebut dipengaruhi oleh pengalaman masyarakat pada tahun 2023 ketika beberapa warga diwawancarai media terkait kritik terhadap program pariwisata dan kondisi ekonomi masyarakat lokal. Menurut penuturan masyarakat, setelah pemberitaan tersebut muncul, beberapa warga yang sebelumnya rutin menerima bantuan sosial mengaku tidak lagi memperoleh bantuan hingga saat ini.

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan om Arsit selaku penjual buah:

> *Kami takut bicara terlalu jujur karena nanti bantuan bisa dihentikan. Dulu pernah ada warga yang menyampaikan keluhan tentang kondisi masyarakat kepada media, tapi setelah itu bantuan sosial mereka katanya tidak keluar lagi*
> (Wawancara 18 Maret 2026).

Dalam proses penelitian, peneliti juga melakukan wawancara dengan pak Marselinus Jebaru dari Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Barat. Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa pihak dinas sosial selama ini lebih banyak menerima data masyarakat dari pemerintah desa tanpa selalu melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Hal tersebut menurut beliau dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran daerah dan efisiensi dana operasional.

> *Kalau soal bantuan sosial itu tetap berjalan sesuai data yang dikirim dari desa. Untuk turun langsung ke lapangan memang tidak selalu bisa dilakukan karena keterbatasan anggaran dan efisiensi dana dari daerah*.
> (Wawancara dilakukan tanggal 14 April 2026).

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan Yopi Widianti selaku anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat. Dalam wawancara tersebut, beliau menjelaskan bahwa pemerintah daerah sebenarnya telah menyediakan berbagai program beasiswa bagi masyarakat, termasuk beasiswa pendidikan pariwisata dan perguruan tinggi. Namun menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum memanfaatkan kesempatan tersebut secara maksimal.

> *Sebenarnya pemerintah daerah sudah banyak menyediakan beasiswa, baik untuk pendidikan pariwisata maupun perguruan tinggi lainnya. Tapi mungkin masyarakat belum terlalu mengetahui informasi itu atau belum ada kesadaran penuh untuk melanjutkan pendidikan.*
> (Wawancara dilakukan tanggal 15 April 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti melihat bahwa terdapat perbedaan pandangan antara pemerintah dan masyarakat terkait kondisi yang terjadi di Pulau Komodo. Pemerintah daerah menilai bahwa berbagai program bantuan dan pendidikan sebenarnya telah tersedia, sedangkan masyarakat merasa bahwa dukungan tersebut belum benar-benar dirasakan secara langsung di tingkat desa. Peneliti juga melihat bahwa kurangnya koordinasi dan komunikasi antara instansi pemerintah dengan masyarakat menyebabkan berbagai program yang dibuat belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat lokal. Dalam perspektif William Dunn, kondisi tersebut menunjukkan bahwa responsivitas kebijakan masih belum optimal karena pemerintah belum sepenuhnya mampu memahami dan merespons kebutuhan nyata masyarakat lokal secara langsung dan berkelanjutan.

4.2.6 Ketepatan (*appropriateness)*

Indikator ini berfokus pada apakah kebijakan yang dipilih merupakan alternatif yang paling tepat dibandingkan pilihan kebijakan lainnya dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Suatu kebijakan dapat dianggap tepat apabila isi,

tujuan, strategi, serta bentuk intervensi yang dilakukan sesuai dengan karakteristik masalah yang dihadapi. Ketepatan juga berkaitan dengan kesesuaian antara kebijakan dan kondisi sosial, ekonomi, budaya, maupun lingkungan tempat kebijakan tersebut diterapkan. Dengan kata lain, kebijakan harus mampu menjawab akar permasalahan secara relevan dan kontekstual. Ketepatan digunakan untuk menilai apakah kebijakan yang diterapkan benar-benar menjadi solusi yang sesuai terhadap persoalan yang ada. Melalui evaluasi ketepatan, peneliti dapat mengetahui apakah kebijakan tersebut layak dipertahankan, diperbaiki, atau bahkan diganti dengan alternatif kebijakan lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan pembangunan.(Hendiyani & Fansuri, 2024)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara lapangan, masyarakat menyadari bahwa keberadaan kawasan konservasi sangat penting untuk menjaga alam Pulau Komodo agar tetap lestari. Masyarakat memahami bahwa komodo merupakan satwa langka yang harus dilindungi dan menjadi bagian penting dari identitas Pulau Komodo sebagai kawasan wisata dunia. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat sebenarnya mendukung upaya pelestarian lingkungan dan perlindungan habitat komodo. Namun di sisi lain, masyarakat merasa bahwa pelaksanaan kebijakan konservasi belum sepenuhnya mempertimbangkan keberlangsungan kehidupan masyarakat lokal, terutama terkait ruang hidup, masa depan generasi muda, dan keberadaan budaya masyarakat Suku Komodo di Pulau Komodo sendiri. Salah satu persoalan utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah semakin terbatasnya lahan permukiman masyarakat akibat sebagian besar wilayah Pulau Komodo berada dalam kawasan konservasi Taman Nasional Komodo.

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa kawasan permukiman masyarakat di Desa Komodo saat ini sudah cukup padat. Rumah-rumah masyarakat dibangun sangat berdekatan karena keterbatasan ruang yang dapat digunakan untuk tempat tinggal. Sementara itu, jumlah penduduk terus bertambah setiap tahun sehingga kebutuhan lahan untuk generasi baru juga semakin meningkat. Akan tetapi masyarakat tidak lagi bebas membuka wilayah permukiman baru karena sebagian besar kawasan telah masuk dalam wilayah konservasi yang penggunaannya dibatasi oleh pemerintah. Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa pembatasan pemanfaatan lahan di kawasan konservasi menyebabkan masyarakat berada pada posisi yang dilematis. Di satu sisi masyarakat mendukung perlindungan kawasan konservasi, namun di sisi lain masyarakat membutuhkan ruang hidup yang memadai untuk memenuhi kebutuhan permukiman dan keberlangsungan hidup keluarga mereka. Kondisi tersebut menunjukkan adanya benturan antara kepentingan konservasi lingkungan dengan kebutuhan sosial masyarakat lokal.(Tresa Rosari et al., 2025)

Penelitian ini menemukan bahwa sebagian generasi muda mulai terpaksa keluar dari Pulau Komodo untuk mencari tempat tinggal dan pekerjaan di daerah lain seperti Labuan Bajo dan wilayah lain di Manggarai Barat. Kondisi tersebut

menimbulkan kekhawatiran bahwa secara perlahan masyarakat asli Pulau Komodo akan semakin berkurang keberadaannya di pulau tersebut. Selain persoalan ruang hidup, penelitian ini juga menemukan adanya kekhawatiran masyarakat terhadap hilangnya identitas budaya Suku Komodo di Pulau Komodo sendiri. Bagi masyarakat lokal, Pulau Komodo bukan hanya sekadar tempat tinggal, tetapi merupakan bagian dari sejarah, identitas, dan kehidupan budaya mereka sejak dahulu. Hubungan masyarakat dengan Pulau Komodo tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga memiliki hubungan emosional dan historis yang sangat kuat.

Hal ini Di perkuat oleh Bapak Bakri selaku nelayan di pulau komodo:

> *Kami tidak rela kalau suatu saat orang Komodo hilang dari pulau ini. Pulau ini bukan cuma tempat tinggal bagi kami, tapi tanah leluhur yang sudah kami tempati sejak nenek moyang dahulu. Di sini kami lahir, besar, hidup bersama laut dan komodo, jadi semua punya hubungan dengan kehidupan kami. Kami takut nanti anak cucu kami harus pergi karena sudah tidak ada tempat tinggal dan pekerjaan di sini. Kalau itu terjadi, lama-lama masyarakat asli Komodo bisa hilang dari pulau ini, padahal kami yang sejak dulu menjaga dan hidup berdampingan dengan alam di sini.* (Wawancara dilakukan tanggal 16 Maret 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki ikatan batin yang sangat kuat terhadap tanah kelahiran mereka. Masyarakat merasa bahwa keberadaan mereka di Pulau Komodo merupakan bagian penting dari sejarah panjang kehidupan Suku Komodo yang telah hidup berdampingan dengan alam dan satwa komodo sejak zaman nenek moyang mereka.

Dalam hasil wawancara, beberapa masyarakat bahkan menjelaskan bahwa komodo bukan hanya dianggap sebagai hewan biasa, tetapi dipandang sebagai bagian dari kehidupan budaya masyarakat dan dianggap sebagai “saudara” yang hidup bersama mereka secara turun-temurun. Cerita dan kepercayaan mengenai hubungan masyarakat dengan komodo masih diwariskan dari generasi ke generasi dan menjadi bagian penting dalam identitas budaya masyarakat lokal.

Om Irus selaku nelayan juga menyatakan :

> *Dari dulu kami hidup sama komodo di pulau ini. Kami sudah anggap mereka bagian dari kehidupan kami. Sejak kecil kami diajarkan orang tua untuk hidup berdampingan dengan komodo dan menjaga mereka seperti kami menjaga lingkungan sendiri. Bagi kami, komodo bukan hanya hewan wisata, tapi sudah seperti saudara yang hidup bersama masyarakat di pulau ini sejak nenek moyang dulu. Karena itu kami sedih kalau suatu saat nanti masyarakat asli Komodo justru harus pergi dari pulau ini. Kami*

takut nanti hanya komodonya yang tinggal, sementara orang Komodo sendiri sudah tidak ada lagi di tanah kelahirannya.
(Wawancara di lakukan tanggal 16 Maret2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hubungan masyarakat dengan komodo memiliki nilai budaya dan sejarah yang mendalam. Oleh karena itu, masyarakat merasa sedih dan khawatir apabila suatu saat nanti generasi Suku Komodo tidak lagi tinggal di Pulau Komodo karena keterbatasan ruang hidup dan tekanan ekonomi yang mereka alami.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa keterbatasan lapangan pekerjaan dan rendahnya akses pendidikan menyebabkan sebagian generasi muda memilih meninggalkan Pulau Komodo untuk mencari kehidupan yang lebih baik di luar daerah. Kondisi tersebut memperbesar kekhawatiran masyarakat terhadap hilangnya identitas budaya lokal karena generasi muda mulai terpisah dari lingkungan budaya mereka sendiri.

kak Irsan selaku Tour guide lokal menjelaskan:

Kalau anak-anak muda terus keluar dari pulau karena kerja dan sekolah susah, lama-lama budaya asli di sini bisa hilang. Sekarang saja sudah banyak anak muda yang setelah sekolah di luar pulau memilih tinggal di sana karena di Komodo lapangan kerja terbatas dan tempat tinggal juga makin sempit. Kami takut nanti generasi berikutnya sudah tidak lagi mengenal adat, cerita, dan kehidupan asli masyarakat Komodo seperti dulu. Padahal dari kecil kami hidup berdampingan dengan laut dan komodo, itu sudah jadi bagian dari kehidupan kami. Kalau anak-anak muda terus pergi dan tidak kembali, lama-lama orang asli Komodo bisa semakin sedikit di pulau ini dan budaya kami perlahan hilang.(Wawancara dilakukan tanggal 17 Maret 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat melihat persoalan sosial budaya sebagai dampak jangka panjang dari kebijakan yang belum sepenuhnya memperhatikan keberlangsungan masyarakat lokal

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pulau Komodo, dapat disimpulkan bahwa kebijakan konservasi dan pengembangan pariwisata memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan masyarakat Suku Komodo, baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya, maupun pendidikan. Kebijakan konservasi memang berhasil menjaga kawasan Taman Nasional Komodo dan menjadikan Pulau Komodo semakin dikenal sebagai destinasi wisata internasional. Perkembangan pariwisata juga membawa perubahan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan meningkatkan kunjungan wisatawan ke kawasan tersebut. masyarakat lokal masih menghadapi berbagai kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat mengalami keterbatasan akses modal usaha karena tidak memiliki

sertifikat tanah yang dapat dijadikan jaminan di bank. Pilihan mata pencaharian masyarakat juga semakin terbatas karena masyarakat tidak lagi bebas bertani dan beternak, sehingga sebagian besar hanya bergantung pada sektor nelayan dan pariwisata. Dalam sektor perikanan, nelayan harus melaut lebih jauh ke laut lepas dengan biaya operasional dan risiko keselamatan yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya.

Penelitian juga menemukan bahwa manfaat perkembangan pariwisata belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh masyarakat lokal. Sebagian besar usaha wisata besar masih didominasi oleh pihak luar yang memiliki modal, pendidikan, dan keterampilan lebih baik. Rendahnya tingkat pendidikan serta minimnya pelatihan keterampilan membuat masyarakat lokal sulit bersaing dalam dunia pariwisata yang terus berkembang. masyarakat juga mengalami kekhawatiran terhadap masa depan ruang hidup dan identitas budaya mereka. Keterbatasan lahan permukiman membuat masyarakat takut suatu saat nanti anak cucu mereka tidak lagi dapat tinggal di Pulau Komodo. Masyarakat juga khawatir generasi muda semakin banyak meninggalkan pulau karena keterbatasan pendidikan dan lapangan pekerjaan. Bagi masyarakat Suku Komodo, Pulau Komodo bukan hanya tempat tinggal, tetapi bagian dari sejarah dan identitas budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun.

4.2.7. Tabel Indikator dan Hasil Analisis Teori

Tabel 4. 1

No	Indikator Teori	Definisi Indikator	Temuan Lapangan	Hasil Analisis
1.	Efektivitas (*Effectiveness*)	Secara umum, efektivitas mengacu pada keberhasilan suatu kebijakan dalam menghasilkan dampak atau perubahan yang diharapkan. Semakin besar tingkat pencapaian tujuan kebijakan, maka semakin efektif	Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa kebijakan konservasi berhasil menjaga kelestarian kawasan Taman Nasional Komodo. Habitat komodo, kawasan savana, hutan,	Kebijakan telah efektif dalam mencapai tujuan utama konservasi dan pengembangan pariwisata. Keberhasilan menjaga populasi komodo dan meningkatnya kunjungan wisata merupakan indikator tercapainya

		kebijakan tersebut. Dalam evaluasi kebijakan publik, efektivitas tidak hanya melihat apakah program telah dilaksanakan, tetapi juga apakah pelaksanaannya benar-benar memberikan hasil sesuai dengan sasaran yang dituju.	dan ekosistem laut masih terjaga dengan baik. Jumlah wisatawan juga terus meningkat dan Pulau Komodo semakin dikenal sebagai destinasi wisata internasional. Namun demikian, masyarakat lokal mengaku manfaat ekonomi dari perkembangan pariwisata belum dirasakan secara merata. Masyarakat masih menghadapi keterbatasan modal usaha, sulit memperoleh pekerjaan yang layak, serta rendahnya akses pendidikan dan keterampilan.	sasaran kebijakan. Akan tetapi, efektivitas kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum optimal karena manfaat pembangunan masih lebih dominan dirasakan pada sektor wisata secara umum dibandingkan peningkatan kualitas hidup masyarakat Suku Komodo secara langsung.
2.	Efisiensi (*Efficiency*)	Efisiensi merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai hubungan antara hasil yang	Nelayan tradisional menyampaikan bahwa setelah adanya pembatasan	Kebijakan konservasi belum menunjukkan efisiensi yang optimal dari

		dicapai dengan sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan. Suatu kebijakan dikatakan efisien apabila tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan penggunaan biaya, waktu, tenaga, dan sumber daya yang seminimal mungkin tanpa mengurangi kualitas hasil yang diperoleh.	wilayah tangkap, mereka harus melaut lebih jauh ke laut lepas untuk memperoleh hasil tangkapan. Kondisi ini menyebabkan peningkatan biaya bahan bakar, kebutuhan armada yang lebih besar, waktu melaut yang lebih lama, serta meningkatnya risiko keselamatan akibat cuaca dan gelombang tinggi. Sebagian masyarakat bahkan memilih meninggalkan profesi nelayan karena hasil yang diperoleh tidak lagi sebanding dengan biaya dan risiko yang dihadapi.	sudut pandang masyarakat lokal. Meskipun tujuan pelestarian lingkungan tercapai, biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat relatif tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat konservasi belum sepenuhnya diimbangi oleh mekanisme kompensasi atau pemberdayaan ekonomi yang mampu mengurangi beban masyarakat terdampak.
3.	Kecukupan (*Adequacy*)	Kecukupan merupakan ukuran yang digunakan untuk	Masyarakat mengalami kesulitan memperoleh	Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan belum cukup

		menilai sejauh mana hasil dari suatu kebijakan mampu menyelesaikan atau mengurangi masalah yang menjadi dasar pembentukan kebijakan tersebut. Kecukupan tidak hanya melihat apakah tujuan tercapai, tetapi juga apakah pencapaian tersebut sudah cukup untuk menjawab kebutuhan masyarakat.	akses modal usaha karena sebagian besar tidak memiliki sertifikat tanah yang dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman. Selain itu, pilihan mata pencaharian menjadi semakin terbatas karena masyarakat tidak lagi bebas membuka lahan pertanian atau peternakan. Sebagian besar masyarakat hanya bergantung pada sektor perikanan dan pariwisata yang rentan terhadap perubahan cuaca dan kondisi pasar.	memadai untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Program konservasi dan pengembangan pariwisata belum disertai dukungan yang memadai dalam bentuk akses permodalan, diversifikasi pekerjaan, maupun program pemberdayaan ekonomi. Akibatnya, masyarakat masih berada dalam kondisi ekonomi yang rentan dan sangat bergantung pada sektor tertentu.
4.	Pemerataan (*Equity*)	Pemerataan merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai keadilan dalam distribusi manfaat maupun beban yang	Perkembangan pariwisata di Pulau Komodo mendorong pertumbuhan hotel, restoran, kapal wisata, dan berbagai	Distribusi manfaat ekonomi dari kebijakan pariwisata belum berlangsung secara merata.

		dihasilkan oleh suatu kebijakan. Kebijakan yang baik tidak hanya menghasilkan manfaat, tetapi juga memastikan bahwa manfaat tersebut dapat dirasakan secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat yang menjadi sasaran.	usaha lainnya. Akan tetapi, sebagian besar usaha berskala besar dimiliki oleh investor atau pelaku usaha dari luar daerah. Masyarakat lokal umumnya hanya terlibat sebagai pekerja, nelayan, pedagang kecil, atau pelaku usaha berskala mikro dengan pendapatan yang relatif terbatas.	Masyarakat lokal belum memiliki kesempatan yang setara dalam mengakses modal, pendidikan, teknologi, dan jaringan usaha. Akibatnya, keuntungan terbesar dari perkembangan pariwisata lebih banyak dinikmati oleh pihak luar, sementara masyarakat lokal memperoleh manfaat dalam skala yang lebih kecil.
5.	Responsivitas (*Responsiveness*)	Responsivitas merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan mampu merespons kebutuhan, aspirasi, dan harapan masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan. Kebijakan yang responsif biasanya	Masyarakat menyampaikan bahwa mereka masih jarang memperoleh pelatihan keterampilan, pendidikan pariwisata, pelatihan bahasa asing, maupun pendampingan usaha yang berkelanjutan. Selain itu, sebagian	Adanya perbedaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat mengenai keberhasilan program yang dijalankan. Responsivitas kebijakan belum optimal karena kebutuhan riil masyarakat belum sepenuhnya terakomodasi

		memperhatikan masukan masyarakat serta mampu menyesuaikan diri terhadap permasalahan yang berkembang di lapangan.	masyarakat merasa aspirasi mereka belum sepenuhnya didengar oleh pemerintah. Di sisi lain, pemerintah daerah menyatakan bahwa program bantuan sosial dan beasiswa sebenarnya telah tersedia, namun belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.	dalam program yang tersedia. Kurangnya komunikasi, sosialisasi, dan pendampingan menyebabkan berbagai program pemerintah belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kapasitas masyarakat lokal.
6.	Ketepatan (*Appropriatenes*)	Ketepatan merupakan kriteria evaluasi kebijakan yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan benar-benar sesuai dengan permasalahan yang ingin diselesaikan dan kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan. Menurut William N. Dunn, ketepatan tidak hanya melihat apakah	Masyarakat mengakui bahwa kebijakan konservasi sangat penting untuk menjaga kelestarian komodo dan lingkungan Pulau Komodo. Namun masyarakat juga menghadapi keterbatasan ruang permukiman, lapangan pekerjaan, dan peluang	Kebijakan dinilai tepat dalam menjawab kebutuhan pelestarian lingkungan dan perlindungan habitat komodo. Akan tetapi, kebijakan belum sepenuhnya tepat dalam menjawab kebutuhan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat lokal. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan

		tujuan kebijakan telah tercapai, tetapi juga menilai apakah tujuan tersebut memang relevan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang sesuai dengan kondisi masyarakat.	ekonomi. Selain itu, muncul kekhawatiran bahwa generasi muda akan semakin banyak meninggalkan Pulau Komodo sehingga identitas budaya dan keberlangsung an masyarakat Suku Komodo terancam di masa depan.	antara kepentingan konservasi dengan perlindungan hak, ruang hidup, dan kesejahteraan masyarakat Suku Komodo agar tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa PP No. 108 Tahun 2015 memberikan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan masyarakat Suku Komodo di Pulau Komodo. Kebijakan ini berhasil mendukung upaya pelestarian lingkungan dan menjaga keberlangsungan habitat komodo sebagai satwa endemik yang menjadi daya tarik utama pariwisata. Selain itu, perkembangan sektor pariwisata yang terjadi setelah diterapkannya kebijakan tersebut turut mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi di kawasan Pulau Komodo dan sekitarnya.

Perkembangan pariwisata telah membuka berbagai peluang usaha dan pekerjaan baru bagi masyarakat. Sebagian masyarakat memperoleh manfaat melalui kegiatan perdagangan, jasa wisata, transportasi, dan usaha lainnya yang berkaitan dengan sektor pariwisata. Namun, manfaat tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh masyarakat karena masih terdapat keterbatasan dalam akses modal, pendidikan, keterampilan, serta kesempatan untuk terlibat secara lebih luas dalam industri pariwisata yang berkembang. penerapan kebijakan konservasi juga membawa konsekuensi bagi masyarakat yang selama ini bergantung pada sumber daya alam sebagai mata pencaharian utama. Pembatasan aktivitas di beberapa wilayah konservasi menyebabkan sebagian nelayan harus menyesuaikan pola kerja mereka dan menghadapi peningkatan biaya operasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun kebijakan memberikan manfaat bagi pelestarian lingkungan, masyarakat juga harus menghadapi berbagai tantangan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perkembangan pariwisata belum sepenuhnya mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat Suku Komodo. Sebagian besar keuntungan ekonomi masih lebih banyak dinikmati oleh pihak yang memiliki modal dan akses yang lebih baik. Sementara itu, masyarakat lokal masih menghadapi berbagai keterbatasan yang menyebabkan mereka belum mampu memanfaatkan peluang ekonomi secara maksimal. Akibatnya, kesenjangan manfaat pembangunan masih dapat ditemukan di tengah masyarakat. hubungan antara pemerintah dan masyarakat masih perlu diperkuat melalui peningkatan komunikasi, sosialisasi, dan pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat berharap agar berbagai program yang dijalankan tidak hanya berfokus pada pelestarian kawasan, tetapi juga memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kebutuhan pendidikan, pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

penelitian ini menunjukkan bahwa PP No. 108 Tahun 2015 telah berhasil mencapai tujuan konservasi dan mendukung perkembangan pariwisata di Pulau Komodo. Akan tetapi, tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Suku Komodo masih belum tercapai secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan program pendukung yang lebih berpihak kepada masyarakat lokal agar manfaat konservasi dan pariwisata dapat dirasakan secara lebih adil, merata, dan berkelanjutan oleh seluruh masyarakat Suku Komodo.

5.1. SARAN

1) Pemerintah perlu meningkatkan program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan, pendidikan, bantuan modal usaha, dan pendampingan ekonomi agar masyarakat dapat berpartisipasi lebih aktif dalam sektor pariwisata.

2) Balai Taman Nasional Komodo dan pemerintah daerah perlu meningkatkan komunikasi dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi.

3) Perlu adanya kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat lokal agar manfaat ekonomi dari perkembangan pariwisata dapat dirasakan secara lebih merata dan berkelanjutan.

4) Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam mengenai dampak sosial, budaya, dan ekonomi dari kebijakan konservasi terhadap masyarakat yang tinggal di kawasan Taman Nasional Komodo.

Skripsi Andreas

ORIGINALITY REPORT

10%	9%	3%	3%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.ummat.ac.id Internet Source	1%
2	docplayer.info Internet Source	1%
3	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1%
4	www.scribd.com Internet Source	<1%
5	repository.untag-sby.ac.id Internet Source	<1%
6	ejournal.ipdn.ac.id Internet Source	<1%
7	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1%
8	I Putu David Adi Saputra. "Pentingnya Pariwisata Berkelanjutan dalam Menjaga Keseimbangan Lingkungan", AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584), 2024	<1%

	Publication	
9	core.ac.uk Internet Source	<1%
10	es.scribd.com Internet Source	<1%
11	issuu.com Internet Source	<1%
12	Submitted to Politeknik Pariwisata NHI Bandung Student Paper	<1%
13	eprints.pancabudi.ac.id Internet Source	<1%
14	idrtimes.com Internet Source	<1%
15	wagoeblog.wordpress.com Internet Source	<1%
16	pt.scribd.com Internet Source	<1%
17	www.mongabay.co.id Internet Source	<1%
18	murinlapan93.blogspot.com Internet Source	<1%
19	Adnan H., Tadjudin D., Yuliani L., Komarudin H., Lopulalan D., Siagian Y., Munggoro D.,	<1%

(eds.). "Belajar dari Bungo: mengelola sumberdaya alam di era desentralisasi", Center for International Forestry Research (CIFOR), 2008
Publication

20	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1%
21	Submitted to Universitas Andalas Student Paper	<1%
22	naifherry.blogspot.com Internet Source	<1%
23	repository.usd.ac.id Internet Source	<1%
24	www.tenun.eu.org Internet Source	<1%
25	documents1.worldbank.org Internet Source	<1%
26	www.detik.com Internet Source	<1%
27	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1%
28	www.bappeda.kulonprogokab.go.id Internet Source	<1%
29	www.tatestreetart.com Internet Source	<1%

30	jdih.kendalkab.go.id Internet Source	<1%
31	mnj-hutan.pasca.unpatti.ac.id Internet Source	<1%
32	whc.unesco.org Internet Source	<1%
33	www.coursehero.com Internet Source	<1%
34	www.industry.co.id Internet Source	<1%
35	Lita Yarlina. "Penilaian Kriteria Prasarana Bandar Udara Internasional dalam Mendukung Peningkatan Kunjungan Pariwisata [Criteria Assessment on the Facilities of International Airport in Supporting the Increasing Tourist Visit]", Warta Penelitian Perhubungan, 2018 Publication	<1%
36	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<1%
37	edoc.site Internet Source	<1%
38	ejournal.cahayailmubangsa.institute Internet Source	<1%
	mamiberanimimpi.blogspot.com	

39	Internet Source	<1%
40	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1%
41	repository.upi.edu Internet Source	<1%
42	www.traveloka.com Internet Source	<1%
43	www.tumbex.com Internet Source	<1%
44	123dok.com Internet Source	<1%
45	5tempatwisatabagus.wordpress.com Internet Source	<1%
46	Berta Adel Wella, Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah, Ronald Jolly Pongantung. "Evaluasi Kebijakan Perizinan Usaha Berbasis Risiko Pada Usaha Mikro", JURNAL USM LAW REVIEW, 2025 Publication	<1%
47	Harini Sosiati, Tri Wahyono, Ardhia Revarti Azhar, Yuni Nur Fatwaeni. "Pemanfaatan Limbah Tongkol Jagung untuk Makanan Ternak Bernutrisi", Community Empowerment, 2021 Publication	<1%

48	Indriyanto Indriyanto. "Composition, domination, and similarity level of stand among farmers' cultivated blocks at Wan Abdul Rachman Grand Forest Park", Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea, 2022 Publication	<1%
49	Natasya Amalia, Nora Putri. "Evaluasi Upaya Pemerintahan Nagari Sicincin dalam Penyelesaian Sengketa Lahan Tol Padang–Sicincin", Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, 2025 Publication	<1%
50	astridfelicia.blogspot.com Internet Source	<1%
51	e-proceedings.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	<1%
52	j-las.lemkomindo.org Internet Source	<1%
53	media.neliti.com Internet Source	<1%
54	moam.info Internet Source	<1%
55	pumakendari.blogspot.com Internet Source	<1%
56	repository.usm.ac.id Internet Source	

		<1%
57	ww3.utusan.com.my Internet Source	<1%
58	www.batamnews.co.id Internet Source	<1%
59	www.iptek.its.ac.id Internet Source	<1%
60	www.kemenkeu.go.id Internet Source	<1%
61	www.kompasiana.com Internet Source	<1%
62	Mustamin H. Idris, Sel Va, Rizky Destari. "Pengaruh Destinasi Pariwisata Pulau Komodo Terhadap Beberapa Aspek Pembangungan Di Kabupaten Manggarai Barat", JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik), 2019 Publication	<1%
63	jurnal.unpad.ac.id Internet Source	<1%
64	Dessy Eko Prayitno. "Kemitraan Konservasi Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Tenurial dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi di	<1%

Indonesia", Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 2020
Publication

65 Krisna Margaretta Malau, Hielarion Amatus Fatubun, Carolina Diana Mual. "Persepsi Petani tentang Pengembangan Budidaya Kelapa Sawit (Elaeis guineensis Jacq) dengan Tanaman Sela Jagung (Zea mays) di Desa Macuan, Kab. Manokwari, Prov. Papua Barat", Prosiding Seminar Nasional Pembangunan dan Pendidikan Vokasi Pertanian, 2025 <1%
Publication

66 Sahriana Sahriana, Putri Febri Wialdi. "Evaluasi Kebijakan Penyediaan Jalan Usaha Tani dalam Memenuhi Kebutuhan dan Kesejahteraan Petani di Nagari Lansek Kadok Barat", Al-DYAS, 2026 <1%
Publication

Exclude quotes	Off	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	On		